LAPORAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

Tahun 2020

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2020

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (SDM OT) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik, sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro SDM OT sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, kepada *stakeholders*.

Laporan Kinerja Biro SDM OT Tahun 2020 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro SDM OT Tahun 2020. Laporan disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat diperoleh gambaran capaian kinerja Biro SDM OT dalam mendukung Sekretariat Kabinet menyelenggarakan *good governance*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro SDM OT tidak lepas dari kekurangan sehingga upaya-upaya perbaikan kinerja terus dilakukan. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro SDM OT dan seluruh *stakeholders* dalam menganalisis permasalahan di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan. Dengan demikian, program dan kegiatan pada tahun mendatang dapat disusun dengan lebih tepat sasaran, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Jakarta, 14 Juni 2021

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Henny Navilah

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perencanaan Kinerja	12
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja	17
3.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya	50
BAB IV	
PENUTUP	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. PK Biro SDM OT Periode Januari s.d. September 2020 13
Tabel 2.2. PK Biro SDM OT Periode Oktober s.d. Desember 2020 14
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja 18
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Januari s.d. September 2020 18
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Oktober s.d. Desember 2020 19
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (PK 1)/ Sasaran 2 (PK 2) Tahun 2020 22
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (PK 1)/ Sasaran 2 (PK 2) Tahun 2020 23
Tabel 3.6. Indeks Interpretasi Kuesioner 25
Tabel 3.7. Variabel Penilaian Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian 27
Tabel 3.8. Variabel Penilaian Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP Berdasarkan PK 1 34
Tabel 3.9. Variabel Penilaian Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP Berdasarkan PK 2 34
Tabel 3.10. Variabel Penilaian Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai Berdasarkan PK 1 38
Tabel 3.11. Variabel Penilaian Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai Berdasarkan PK 2 38
Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (PK 1)/Sasaran 3 (PK 2) Tahun 2020 40
Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (PK 1)/ Sasaran 3 (PK 2) Tahun 2020 41
Tabel 3.14. Variabel Penilaian Survei Manajemen Tata Laksana Berdasarkan PK 2 46
Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (PK 2) Tahun 2020 49
Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Biro SDM OT Tahun 2020 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. PK Kepala Biro SDM OT Periode Januari s.d. September 2020 15
Gambar 2.2. PK Kepala Biro SDM OT Periode Oktober s.d. Desember 2020 15
Gambar 3.1. Capaian Kinerja Biro Tahun 2020 pada SIKT 21
Gambar 3.2. Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian 24
Gambar 3.3. Penilaian Penerapan Sistem Merit 30
Gambar 3.4. Survei Kepuasan *Output* Layanan Biro SDM OT .. 31

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1.	Struktur Organisasi Biro SDM OT Tahun 2020	5
Grafik 2.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Biro SDM OT Tahun 2020	10
Grafik 3.1.	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian	26
Grafik 3.2.	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP Berdasarkan PK 1 ...	33
Grafik 3.3.	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP Berdasarkan PK 2 ...	33
Grafik 3.4.	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai Berdasarkan PK 1	37
Grafik 3.5.	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai Berdasarkan PK 2	37
Grafik 3.6.	Diagram Profil Pegawai di Lingkungan Biro SDM OT	52

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (SDM OT) Tahun 2020 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro SDM OT Tahun 2020. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sepanjang tahun 2020, akan menjadi dasar rencana tindak lanjut guna meningkatkan kinerja unit kerja pada tahun 2021.

Pada pertengahan tahun 2020 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Penetapan tersebut berimplikasi pada penyesuaian tugas dan fungsi Biro SDM OT. Oleh sebab itu, Biro SDM OT menetapkan sasaran strategis berdasarkan 2 (dua) PK, yaitu berdasarkan PK periode Januari s.d. September dan PK periode Oktober s.d. Desember.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2020 adalah sebesar 104,98% (Memuaskan). Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian dari total 3 (tiga) sasaran kegiatan Biro SDM OT, yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja. Berikut adalah intisari capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2020:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	
		PK 1	PK 2
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	125%	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	101,59%	100,77%
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	92,56%	
TOTAL RATA-RATA		**104,98%**	

Berbagai upaya peningkatan kinerja telah dilakukan dalam proses pencapaian target, mulai dari melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja, mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi dalam berbagai proses bisnis, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pegawai, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kelembagaan, ketatalaksanaan, hingga pengelolaan dalam pemberian dukungan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama/Madya. Biro SDM OT juga menyebarluaskan survei sebagai bentuk asesmen, guna mengukur kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang diberikan Biro SDM OT sepanjang tahun 2020.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, dapat disimpulkan seluruh kegiatan Biro SDM OT berhasil terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal dikarenakan adanya pandemi COVID 19 yang bersifat *force majeur*. Adanya kondisi tidak terduga menuntut Biro SDM OT segera mengubah pola kerja dan melakukan upaya-upaya adaptif dalam merespon kondisi tersebut, sebagai contoh beberapa di antaranya adalah menyediakan pencatatan kehadiran dan penyelenggaraan Diklat secara *online*.

Namun demikian, secara umum target kinerja Biro SDM OT yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Upaya-upaya perbaikan harus terus dilakukan guna meningkatkan kinerja dan merespon tantangan zaman. Biro SDM OT berkomitmen untuk senantiasa melakukan upaya-upaya tersebut, antara lain:

1) Optimalisasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian;
2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan;
3) Penguatan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kepada Tim Penilai Akhir.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis. Pertanggungjawaban tersebut juga merupakan salah satu upaya perwujudan penyelenggaraan *Good Governance*.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan Unit Organisasi/Menteri/Pimpinan Lembaga, dan selanjutnya laporan kinerja tingkat entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga yang telah disusun disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana (SDM OT) Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Biro SDM OT sebagai entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja (Eselon II) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro SDM OT dalam tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka kedudukan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana adalah sebagai berikut:

1.2.1. Kedudukan

Biro SDM OT adalah unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Administrasi.

1.2.2. Tugas

Biro SDM OT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir, penyelenggaraaan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

1.2.3. Fungsi

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a) perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

b) pengolahan data dan informasi kepegawaian;

c) penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

d) pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;

e) penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

f) perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;

g) pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

h) pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;

i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi

1.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana membawahi 4 (empat) bagian yaitu:

a) Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya, pengolahan data dan informasi kepegawaian, penelitian, penyiapan, dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyiapan dan pelaksanaan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dibantu oleh 3 (tiga) subbagian, yaitu:

1) Subbagian Perencanaan dan Informasi Pegawai;
2) Subbagian Mutasi, Kepangkatan, dan Pensiun; dan
3) Subbagian Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai.

b) Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai

Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kapasitas pegawai, dan kerja sama dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dan pegawai lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai dibantu oleh 3 (tiga) subbagian, yaitu:

1) Subbagian Perencanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
2) Subbagian Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai; dan
3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas Pegawai.

c) Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai

Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan permasalahan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, pelaksanaan konseling pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyelenggaraan administrasi pembinaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai dibantu oleh 3 (tiga) subbagian, yaitu:

1) Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2) Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Non Pegawai Negeri Sipil; dan
3) Subbagian Administrasi Pembinaan dan Konsultasi Pegawai.

d) Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan peraturan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana dibantu oleh 2 (dua) subbagian, yaitu:

1) Subbagian Organisasi
2) Subbagian Tata Laksana

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut gambaran struktur organisasi Biro SDM OT:

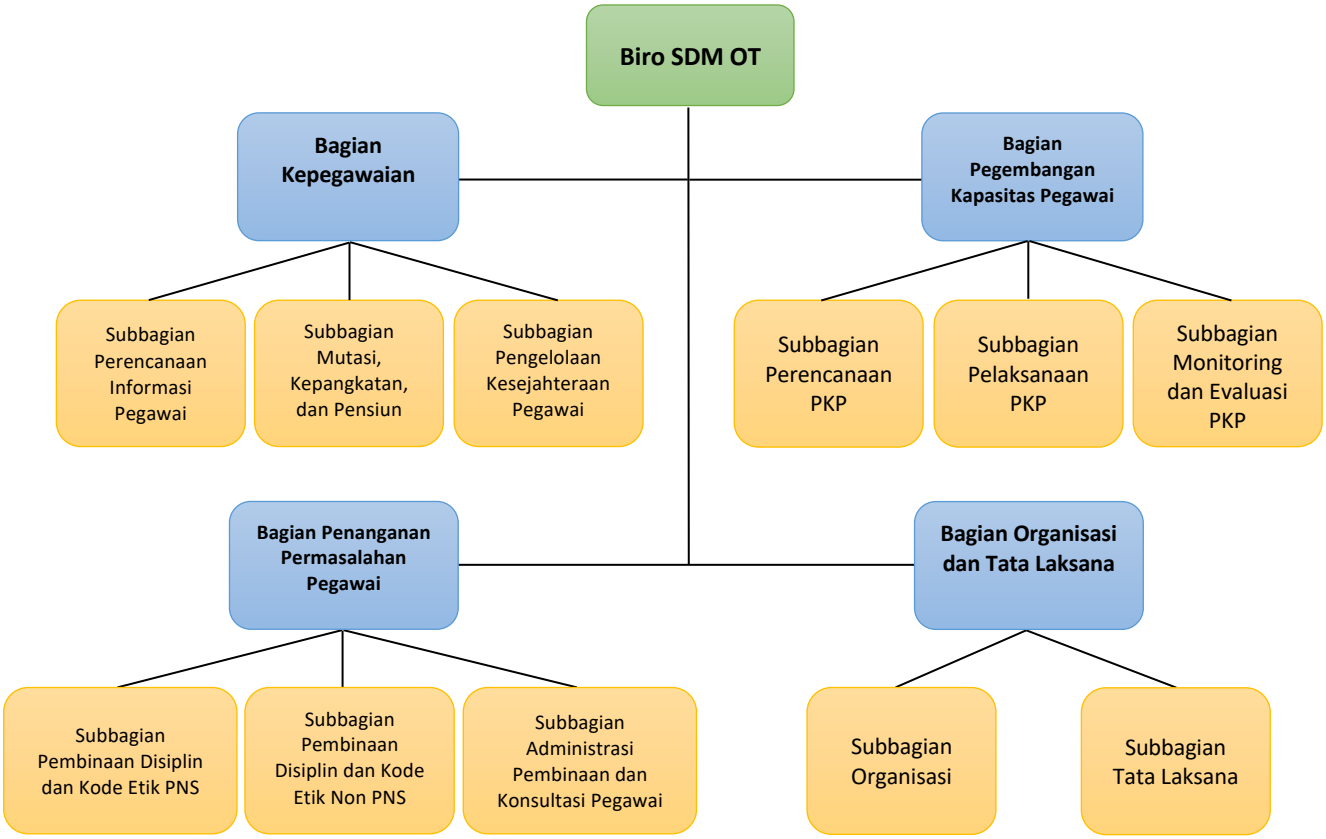

Grafik 1.1. Struktur Organisasi Biro SDM OT Tahun 2020

1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Arah kebijakan Biro SDM OT dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet yaitu mengoptimalkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, peran strategis Biro SDM OT adalah sebagai berikut:

a) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;

b) Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Berkualitas.

Dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam organisasi diperlukan analisis eksternal dan internal yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan maupun kelemahan serta permasalahan yang dihadapi sebuah organisasi. Hasil analisis tersebut bersama dengan arahan strategis organisasi digunakan untuk menetapkan sasaran, perumusan strategis, dan implementasinya.

a) Kekuatan

   1) Memiliki struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang jelas:

   2) Tersedianya jumlah sumber daya manusia yang memadai; dan

   3) Komitmen pejabat dan pegawai dalam mengelola manajemen kepegawaian.

b) Kelemahan

   1) Sistem Informasi Kepegawaian yang belum terintegrasi;

   2) Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; dan

   3) Sistem Informasi yang ada belum menunjang proses bisnis pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

c) Peluang

   1) Tersedianya kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah yang lain untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Sekretariat Kabinet;

2) Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini, termasuk di bidang sumber daya manusia; dan

3) Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dan kementerian/lembaga lainnya.

d) Ancaman

1) Adanya kondisi pandemi COVID-19 berpotensi menghambat kecepatan dan kelancaran proses bisnis;

2) Sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan profesional pada instansi pemerintah lainnya;

3) Adanya kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan dapat diukur pada instansi pemerintah lainnya dengan *core* yang sama.

Berdasarkan potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini maupun kemungkinan yang akan datang, meliputi:

a) Aspek Kelembagaan

Perubahan struktur organisasi yang cenderung dinamis berpotensi memperlambat proses adaptasi kerja.

b) Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antara pejabat/pegawai di lingkungan Biro SDM OT serta dengan unit kerja lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Biro.

c) Aspek Sumber Daya Manusia

Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di Biro SDM OT perlu ditingkatkan guna menghadapi tuntutan dan beban kerja yang semakin besar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan proyeksi Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

d) Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yang telah ada belum saling terintegrasi dan masih dalam proses pengembangan sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LKj Biro SDM OT Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj tahun 2020, kedudukan Biro SDM OT dalam Sekretariat Kabinet beserta struktur organisasinya, serta aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan rencana strategis dan ikhtisar perjanjian kinerja Biro SDM OT.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Biro SDM OT yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Biro SDM OT Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah kebijakan Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yaotu memberikan dukungan pengelolaan manajemen cabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengacu pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet tersebut, arah kebijakan Biro SDM OT adalah:

Mengoptimalkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Biro SDM OT sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi organisasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Oleh sebab itu, pada prinsipnya Biro SDM OT memiliki visi dan misi yang **selaras** dengan Sekretariat Kabinet. Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro SDM OT adalah sebagai berikut

VISI

Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan kelembagaan yang efektif di lingkungan Sekretariat Kabinet secara profesional

MISI

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Grafik 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Biro SDM OT Tahun 2020

Penjelasan di atas pada prinsipnya menggambarkan arah organisasi secara berjenjang. Dimulai dari menetapkan visi, yang kemudian visi tersebut dioperasionalisasikan ke dalam misi, menetapkan tujuan, dan menetapkan sasaran kegiatan yang lebih spesifik dan terfokus. Setelah menetapkan sasaran kegiatan, langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja diperlukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan secara terukur dan dapat dicapai.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sangat penting dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a) Meningkatkan probabilitas keberhasilan pencapaian rencana jangka panjang unit kerja, karena keberhasilan unit kerja berkontribusi dalam keberhasilan tujuan organisasi;
b) Meletakkan dasar yang kuat untuk melaksanakan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi; dan
c) Memicu kesadaran dan tanggung jawab seluruh unsur penyelenggara organisasi untuk memberikan performa yang baik dalam rangka pemenuhan capaian kinerja organisasi.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/unit kerja dalam rentang kurun waktu satu tahun. Perjanjian tersebut merepresentasikan komitmen dan janji yang jelas dan terukur, sehingga akan mendorong pengemban tanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan kinerja satuan yang dipimpinnya. PK juga berfungsi sebagai medium penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, serta sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Sasaran kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Pencapaian sasaran dapat mengarahkan pada kegiatan yang spesifik dan terfokus, sehingga memudahkan pengalokasian sumber-sumber daya yang diperlukan. Guna mencapai sasaran kegiatan dimaksud, diperlukan indikator kinerja yang terukur dan dapat dicapai.

Biro SDM OT telah menyusun PK sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholders* pada tahun 2020. Untuk diketahui, selama tahun 2020 terdapat 2 (dua) kali penyusunan PK, yaitu PK periode Januari s.d. September 2020 (dalam laporan ini selanjutnya disebut PK 1) dan PK periode Oktober s.d. Desember 2020 (selanjutnya disebut PK 2). Perubahan dari PK 1 menjadi PK 2 ini didasari oleh adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Kabinet, yang merupakan tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020.

PK Biro SDM OT dimaksud terdiri dari sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

PK Biro SDM OT Periode Januari s.d. September 2020 (PK 1):

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%
2	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%

Tabel 2.1. PK Biro SDM OT Periode Januari s.d. September 2020

PK Biro SDM OT Periode Oktober s.d. Desember 2020 (PK 2):

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%

Tabel 2.2. PK Biro SDM OT Periode Oktober s.d. Desember 2020

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70 Persen
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80 Persen
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80 Persen
2	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80 Persen
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80 Persen

	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana		
1.	Rekrutmen dan pengangkatan pegawai	Rp.2.602.939.000,-
2.	Administrasi kepegawaian	Rp.257.978.000,-
3.	Pembinaan kepegawaian	Rp.23.250.000,-
4.	Pengembangan pegawai	Rp.3.442.368.000,-
5.	Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai	Rp.690.000,-
6.	Penempatan/mutasi pegawai	Rp.67.122.000,-
7.	Pemberhentian pegawai	Rp.690.000,-
8.	Penyusunan laporan kepegawaian	Rp.690.000,-
9.	Pengelolaan kelembagaan	Rp.39.895.000,-
10.	Tatalaksana organisasi	Rp.27.676.000,-
11.	Koordinasi kelembagaan	Rp.36.702.000,-
12.	Gaji dan Tunjangan	Rp.168.353.570.000,-
	Total Anggaran	Rp.174.853.570.000,-

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

Gambar 2.1. PK Kepala Biro SDM OT Periode Januari s.d. September 2020

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

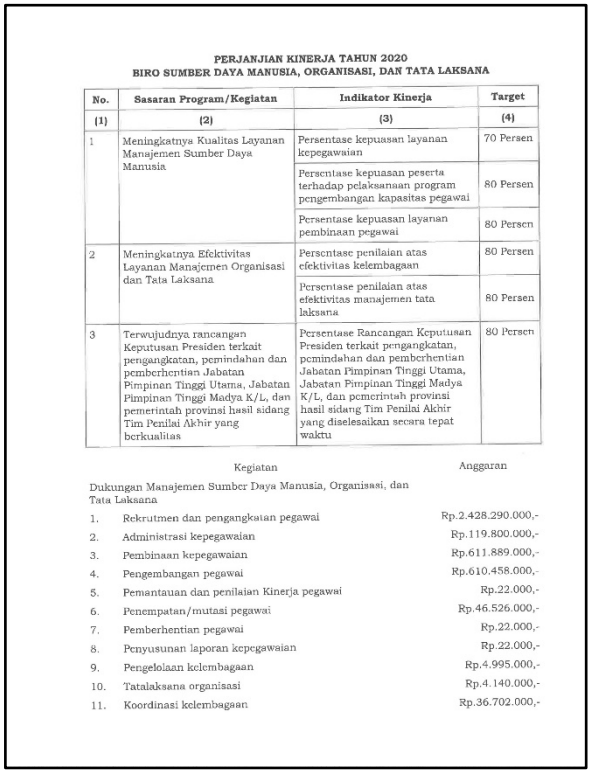

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70 Persen
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80 Persen
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80 Persen
2	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80 Persen
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80 Persen
3	Terwujudnya rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80 Persen

	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana		
1.	Rekrutmen dan pengangkatan pegawai	Rp.2.428.290.000,-
2.	Administrasi kepegawaian	Rp.119.800.000,-
3.	Pembinaan kepegawaian	Rp.611.889.000,-
4.	Pengembangan pegawai	Rp.610.458.000,-
5.	Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai	Rp.22.000,-
6.	Penempatan/mutasi pegawai	Rp.46.526.000,-
7.	Pemberhentian pegawai	Rp.22.000,-
8.	Penyusunan laporan kepegawaian	Rp.22.000,-
9.	Pengelolaan kelembagaan	Rp.4.995.000,-
10.	Tatalaksana organisasi	Rp.4.140.000,-
11.	Koordinasi kelembagaan	Rp.36.702.000,-

12.	Gaji dan Tunjangan	Rp.168.353.570.000,
	Total Anggaran	Rp.172.216.438.000,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

Gambar 2.2.
PK Kepala Biro SDM OT Periode Oktober s.d. Desember 2020

Pada prinsipnya, PK dapat dilihat sebagai instrumen yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya. Adanya PK juga dapat membangun motivasi bekerja yang orientasi *outcome*, mengingat hal ini diperlukan guna mencapai sasaran kegiatan dan tujuan di unit kerja dan level eselon masing-masing. Keberhasilan tersebut akan turut berdampak pada keberhasilan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Penjabaran lebih lanjut mengenai capaian kinerja Biro SDM OT atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan akan dijelaskan pada BAB selanjutnya.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Biro SDM OT merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan. Kinerja Biro SDM OT dibangun melalui komitmen terhadap pemenuhan target kinerja yang diperjanjikan di awal tahun serta upaya menindaklanjuti rekomendasi baik dari hasil evaluasi pihak internal maupun eksternal. Upaya pemenuhan target kinerja dimaksud serta tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja akan menelurkan suatu hasil yang disebut dengan capaian kinerja

Gambaran mengenai capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran yang sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas unit kerja dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada unit kerja tersebut. Pengukuran digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan indikator kinerja berdasarkan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat keberhasilan pada indikator kinerja menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro SDM OT dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro SDM OT tahun 2020 dilaporkan dan dimonitor melalui SIKT2. Pengukuran capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2020 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	Penggolongan Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan	**Biru**
2.	85% - 100%	Sangat Baik	**Hijau**
3.	70% - 85%	Baik	**Oranye**
4.	55% - 70%	Cukup	**Kuning**
5.	<55 %	Kurang Baik	**Merah**

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

Seperti yang sudah dijelaskan di BAB II, selama tahun 2020 terdapat 2 (dua) kali penyusunan PK, yaitu PK periode Januari s.d. September 2020 (PK 1) dan PK periode Oktober s.d. Desember 2020 (PK 2). Perubahan dari PK 1 menjadi PK 2 ini didasari oleh adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Kabinet, yang merupakan tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020. Berikut adalah capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan di dalam PK:

Capaian Kinerja Berdasarkan PK 1 (Januari s.d. September 2020):

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70%	79,25%	113,21%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%	75,17%	93,96%
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%	78,10%	97,62%

2	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%	61,44%	76,80%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	86,67%	108,33%

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja bulan Januari s.d. September 2020

Capaian Kinerja Berdasarkan PK 2 (Oktober s.d. Desember 2020):

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	100%	125%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70%	79,25%	113,21%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%	74.05%	92,56%
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%	77,25%	96,56%

3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%	61,44%	76,80%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	86,67%	108,33%

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja bulan Oktober s.d. Desember 2020

Berdasarkan deskripsi pada kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa perubahan target kinerja Biro SDM OT pada tahun 2020 hanya berupa penambahan masing-masing sebanyak 1 (satu) sasaran dan indikator kinerja. Sedangkan perbedaan nilai yang terdapat pada realisasi indikator kinerja berupa *"persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai" dan "persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai",* disebabkan karena adanya perubahan lingkup tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa tugas dan fungsi yang berpindah ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang, sehingga perolehan capaian kinerja antara PK menjadi berbeda.

Selanjutnya berdasarkan perbandingan antara tingkat realisasi dengan target, dapat disimpulkan bahwa terdapat capaian pada beberapa indikator kinerja yang telah tercapai secara optimal (melebihi target), namun masih terdapat pula capaian pada sebagian indikator kinerja yang belum mencapai target minimum yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2020 dapat dilihat pada visualisasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Kinerja Terpadu, sebagai berikut:

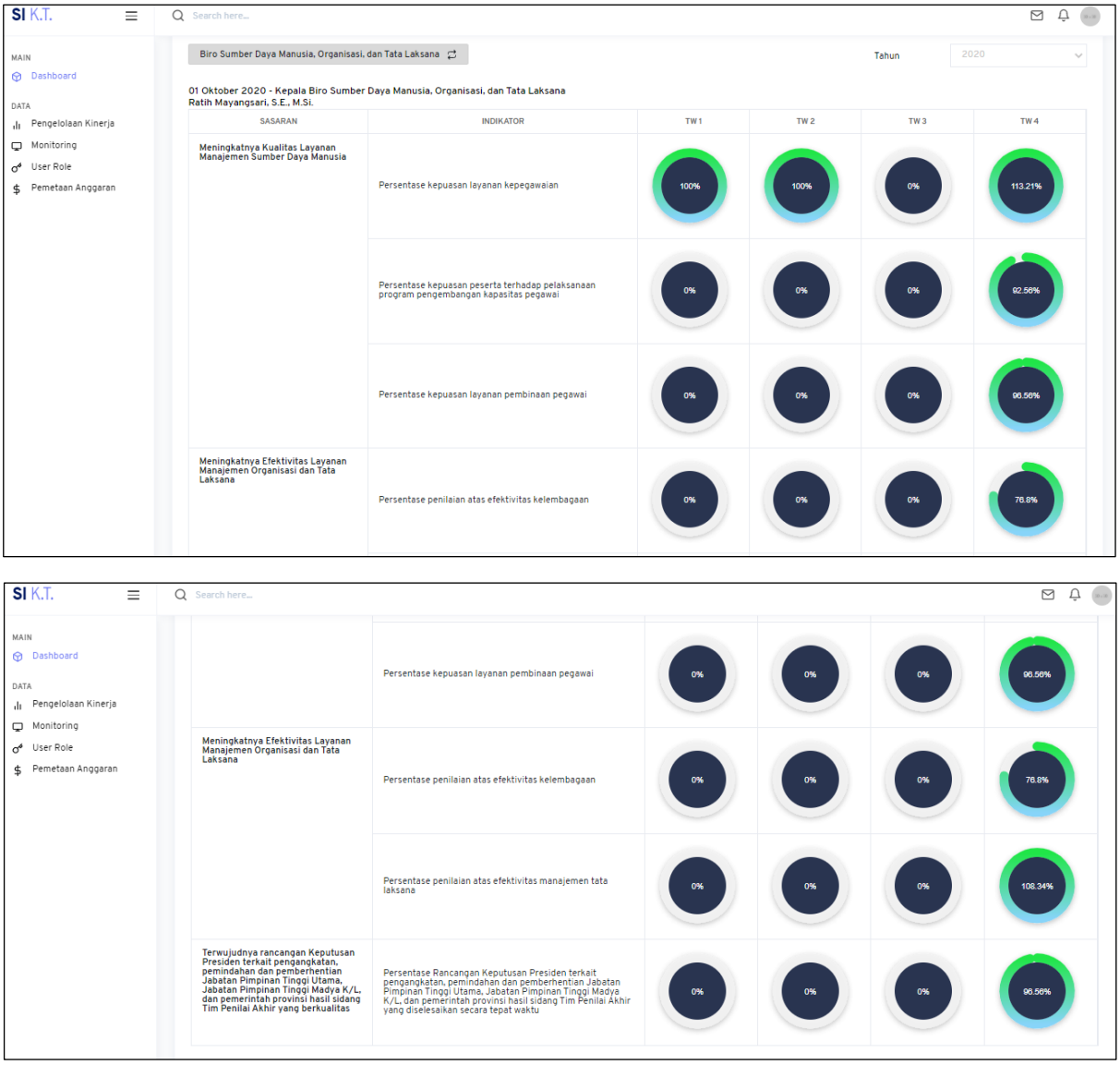

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 pada SIKT

Uraian rinci mengenai capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2020, dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1 (PK 1)/Sasaran 2 (PK 2): Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia

Sasaran tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, antara lain meliputi kegiatan:

a) Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lainnya;
b) Penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
c) Penatausahaan pensiunan dan kenaikan pangkat;
d) Penyelesaian administrasi penggajian dan kesejahteraan;
e) Pelayanan absensi, cuti, surat keterangan, dan Sistem Informasi Pegawai;
f) Pelayanan tanda pengenal pegawai, asuransi kesehatan, dan administrasi lainnya;
g) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
h) Pemberian beasiswa;
i) Pelaksanaan magang;
j) Pembinaan ASN dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
k) Penyelesaian permasalahan pegawai;
l) Penegakan kode etik dan disiplin pegawai;
m) Penyelesaian Administrasi terkait Permohonan Izin ke Luar Negeri;

Uraian mengenai capaian atas sasaran dimaksud sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian		Kategori Pencapaian Kinerja
			PK 1	PK 2	PK 1	PK 2	
1	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70%	79,25%		113,21%		Memuaskan
2	Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%	75,17%	74,05%	93,96%	92,56%	Sangat Baik
3	Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%	78,10%	77,25%	97,62%	96,56%	Sangat Baik

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (PK 1)/Sasaran 2 (PK 2) Tahun 2020

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Responden survei merupakan perwakilan pejabat/pegawai dari masing-masing unit kerja serta eselon di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hasil survei menunjukkan pencapaian kinerja terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen SDM tergolong kategori *Memuaskan* dan *Sangat Baik*.

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya:

Tahun	Target	Realisasi		Capaian		Kategori Pencapaian Kinerja
		PK 1	PK 2	PK 1	PK 2	
Persentase kepuasan layanan kepegawaian						
2018	70%	77,03%		110,04%		Memuaskan
2019	70%	76,24%		108,91%		Memuaskan
2020	70%	79,25%		113,21%		Memuaskan
Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai						
2018	80%	67,68%		84,60%		Baik
2019	80%	72,48%		90,60%		Sangat Baik
2020	80%	75,17%	74,05%	93,96%	92,56%	Sangat Baik
Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai						
2018	80%	77,96%		97,45%		Sangat Baik
2019	80%	77,30%		96,62%		Sangat Baik
2020	80%	78,10%	77,25%	97,62%	96,56%	Sangat Baik

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (PK 1)/Sasaran 2 (PK 2) Tahun 2020

1) Persentase kepuasan layanan kepegawaian

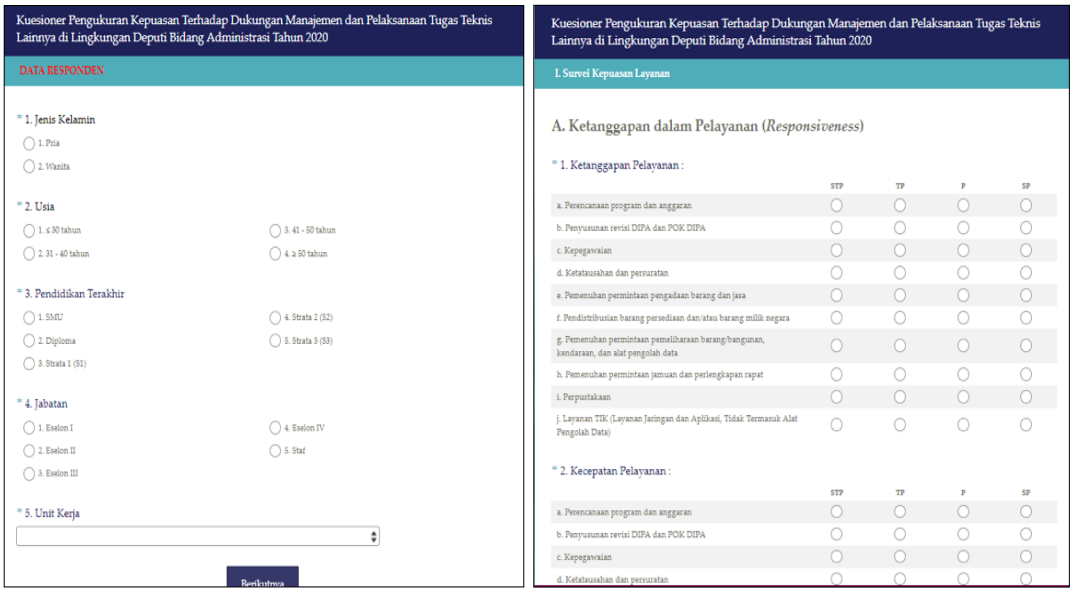

Gambar 3.2 Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian

Survei untuk mengukur kepuasan Layanan Kepegawaian dan dilaksanakan secara *online* yaitu melalui *website* https://www.surveymonkey.com/r/surveikepuasan2020 yang diselenggakaran oleh Biro AKRB pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2020. Jumlah responden yang terkumpul mengisi survei adalah sebanyak 105 (seratus lima) responden.

Responden survei adalah perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terdiri dari 3 (tiga) orang pejabat struktural meliputi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan 1 (satu) orang pelaksana. Kedua survei dimaksud menggunakan skala *likert* dengan 4 (empat) kategori persepsi, yaitu: Sangat Tidak Puas, Tidak Puas, Puas, dan Sangat Puas. Adapun alasan hanya menggunakan 4 (empat) kategori persepsi adalah untuk menghindari kecenderungan memilih respon netral (nilai tengah).

Nilai interval	Indeks 100%	Interpretasi
1 – 1,7499	25% - 43,749%	Sangat Rendah
1,75 – 2,499	43,75% - 62,49%	Rendah
2,50 – 3,249	62,50% - 81,249%	Tinggi
3,25 – 4	81,25% - 100%	Sangat Tinggi

Tabel 3.6 Indeks Interpretasi Kuesioner

Responden survei adalah perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terdiri dari 3 (tiga) orang pejabat struktural meliputi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan 1 (satu) orang pelaksana. Kedua survei dimaksud menggunakan skala *likert* dengan 4 (empat) kategori persepsi, yaitu: Sangat Tidak Puas, Tidak Puas, Puas, dan Sangat Puas. Adapun alasan hanya menggunakan 4 (empat) kategori persepsi adalah untuk menghindari kecenderungan memilih respon netral (nilai tengah).

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, indeks kepuasan *stakeholder* terhadap layanan kepegawaian cenderung mengalami fluktuasi, namun tidak ekstrim. Pada tahun 2018 angka indeks kepuasan sebesar 77,03%, kemudian pada tahun berikutnya (tahun 2019) mengalami sedikit penurunan ke angka 76,24%. Namun pada tahun 2020 lalu indeks kepuasan membali mengalami peningkatan yang cukup signifikan, naik menjadi sebesar 79,25%. **Hasil tersebut telah mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 80%).** Gambaran mengenai perbandingan indeks kepuasan layanan kepegawaian dapat dilihat pada grafik berikut:

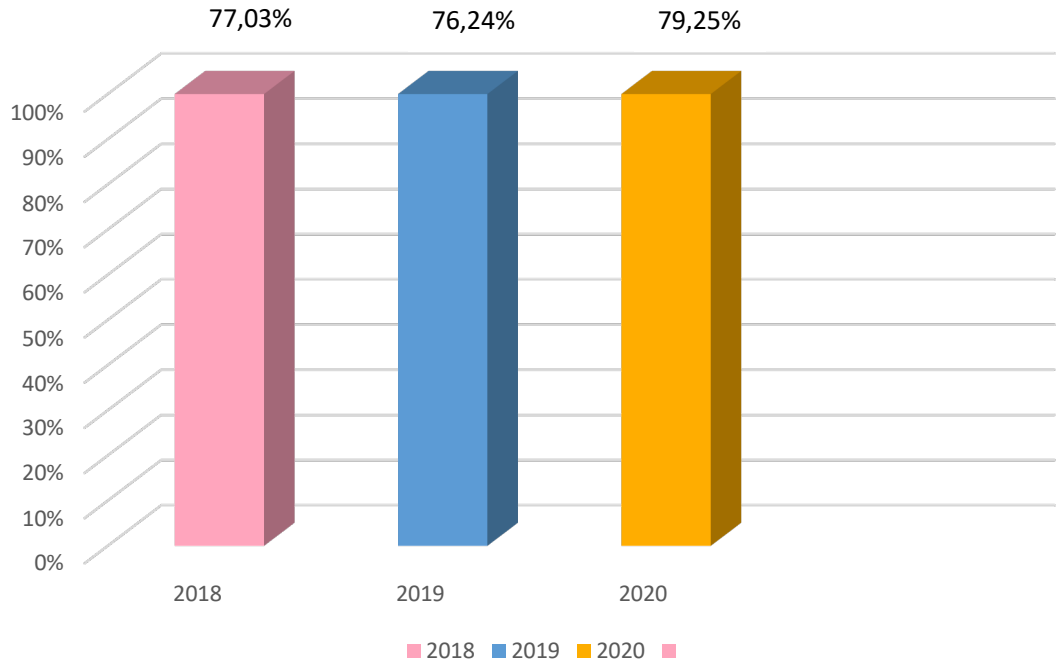

Grafik 3.1 Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian

Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian pada tahun 2020 pada dasarnya masih menggunakan variabel yang sama sejak tahun 2018, yakni variabel *responsiveness* (ketanggapan), *reliability* (keandalan), *assurance* (kapasitas), *empaty* (empati), dan *tangible* (sarana dan prasarana).

a. ***Responsiveness* (Ketanggapan)**

Responsiveness adalah kesadaran dan keinginan untuk membantu pegawai dan memberikan pelayanan dengan cepat. Berdasarkan hasil perhitungan tabulasi survei, indeks kepuasan terhadap aspek Ketanggapan Biro SDMOT dalam memberikan layanan kepegawaian adalah sebesar 80,08% (Tinggi).

b. ***Reliability* (Keandalan)**

Reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Berdasarkan hasil perhitungan tabulasi survei, indeks kepuasan terhadap aspek Keandalan Biro SDMOT dalam memberikan layanan kepegawaian adalah sebesar 78,57% (Tinggi).

c. ***Assurance* (Kepastian)**

Assurance adalah pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan pegawai untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Berdasarkan hasil perhitungan tabulasi survei, indeks kepuasan terhadap aspek Kepastian Biro SDMOT dalam memberikan layanan kepegawaian adalah sebesar 78,69% (Tinggi).

d. *Empathy* (Empati)

Empathy adalah kepedulian, dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada yang dilayani. Berdasarkan hasil perhitungan tabulasi survei, indeks kepuasan terhadap aspek Empati Biro SDMOT dalam memberikan layanan kepegawaian adalah sebesar 80.71% (Tinggi).

e. *Tangible* (Sarana dan Prasarana)

Tangible adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan material yang dipasang dalam pelayanan. Variabel ini menggambarkan wujud secara fisik dan layanan yang diberikan kepada pegawai yang dilayani. Berdasarkan hasil perhitungan tabulasi survei, indeks kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana Biro SDMOT dalam rangka memberikan layanan kepegawaian adalah sebesar 78,21% (Tinggi).

Berikut hasil survei untuk masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

NO	PERNYATAAN	HASIL SURVEI
	***Responsiveness* (Ketanggapan)**	
1	Ketanggapan pelayanan	80.24%
2	Kecepatan pelayanan	79,29%
3	Kemudahan pelayanan	80,71%

NO	PERNYATAAN	HASIL SURVEI
	***Reliability* (Keandalan)**	
1	Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan	79,05%
2	Ketepatan pelayanan	78,10%
	***Assurance* (Kepastian)**	
1	Kepastian pelayanan	78,57%
2	Keakuratan pelayanan	78,81%
	***Empathy* (Empati)**	
1	Keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan	81,90%
2	Kepedulian pegawai dalam pelayanan	79,52%
	***Tangible* (Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan)**	
1	Ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan	78,81%
2	Kenyamanan dan kerapian ruangan pelayanan	77,62%

Tabel 3.7 Variabel Penilaian Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian

Berdasarkan hasil survei dimaksud, layanan kepegawaian yang dilakukan oleh Biro SDMOT pada dasarnya memiliki penilaian yang hampir sama di setiap variabel dengan nilai rata-rata persentasenya adalah 79,25%. Jika diurutkan, variabel yang memiliki penilaian terendah adalah variabel *Tangible* (Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan) khususnya dalam aspek kenyamanan dan kerapian ruangan pelayanan, dengan indeks sebesar 77,62%. Sedangkan penilaian tertinggi adalah variabel *Empathy* (Empati) khususnya terkait keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan, dengan indeks sebesar 81,90%.

Berkenaan dengan hasil indeks tersebut, kualitas layanan kepegawaian oleh Biro SDM OT yang perlu ditingkatkan ke depannya adalah dalam hal *Tangible* (Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan). Biro SDM OT perlu lebih memperhatikan kerapihan dan keteraturan pada tempat melaksanakan pelayanan serta infrastruktur yang mendukung. Hal ini dilakukan agar para *stakeholder* merasa aman dan nyaman ketika berkoordinasi ataupun menerima layanan dari Biro SDM OT. Sedangkan aspek yang sudah baik dan perlu ditingkatkan adalah perihal kepekaan, kepedulian, dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Hal ini menjadi faktor yang penting mengingat lingkup layanan yang diberikan Biro SDM OT berkaitan dengan kebutuhan personal dari para pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Jika dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya sebagaimana pada Grafik 3.1, **indeks kepuasan layanan kepegawaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 3,01%.** Hasil ini menggambarkan bahwa peningkatan kepuasan dari para *stakeholder* Biro SDM OT cukup signifikan. Ada beberapa faktor yang memungkinkan dalam mendasari hal tersebut. Faktor pertama adalah ketulusan dalam membantu pegawai, dengan kata lain pelayanan yang diberikan tidak hanya didasari oleh mengugurkan kewajiban semata. Faktor ini merupakan isu yang krusial dan penting untuk dijadikan nilai-nilai bagi para pegawai di lingkungan Biro SDM OT sehingga secara konsisten ditanamkan dalam pelaksanaan tugas. Faktor lainnya adalah ketanggapan dalam merespon segala kebutuhan pegawai yang menjadi lingkup tanggung jawab Biro SDM OT. Ketanggapan merupakan kompetensi utama dari sebuah unit kerja yang bergerak di bidang pelayanan. Hal ini didukung oleh optimalisasi penggunaan teknologi/aplikasi dalam layanan kepegawaian, khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini.

Selain berdasarkan hasil survei, capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2020 lainnya adalah keberhasilan Sekretariat Kabinet menerapkan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan predikat *Baik*. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 74/KEP.KASN/C/XII/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020. Berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, instansi pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan ASN dengan persetujuan KASN dapat dikecualikan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Pada tahun 2020 Biro SDM OT berupaya mewujudkan hal tersebut. Asesmen dilakukan terhadap aspek-aspek kepegawaian seperti pengadaan pegawai, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, serta penggajian, penghargaan, dan disiplin. Setelah melalui proses asesmen, berdasarkan hasil Rapat Komisioner KASN yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA.74/PMPSM/KASN/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020, penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN di lingkungan Sekretariat Kabinet ditetapkan pada Kategori III (Baik), dengan nilai 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) dan Indeks 0,72 (nol koma tujuh puluh dua).

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

SEKRETARIAT KABINET

ATAS KEBERHASILANNYA MENERAPKAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN PREDIKAT

BAIK

Jakarta, 22 Desember 2020

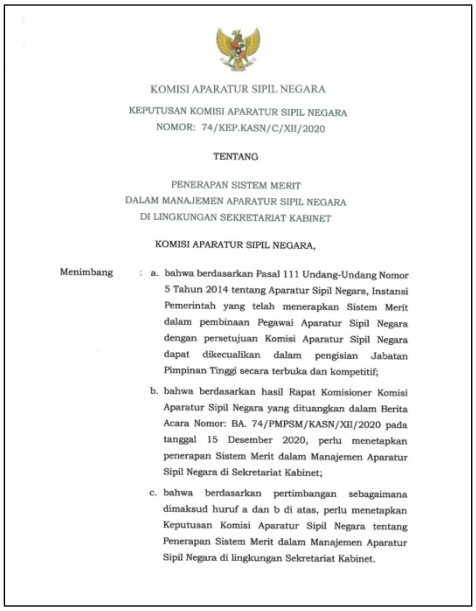
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR: 74/KEP.KASN/C/XII/2020

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara dapat dikecualikan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA. 74/PMPSM/KASN/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020, perlu menetapkan penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Kabinet;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Gambar 3.3 Penilaian Penerapan Sistem Merit

Hasil yang sudah baik tersebut tetap akan dipertahankan dan ditingkatkan agar kinerja Biro SDM OT semakin baik dan dapat bermanfaat secara ril bagi para pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan kepegawaian Biro SDM OT diantaranya:

1. Penguatan koordinasi seluruh pegawai di lingkungan Biro SDMOT dalam pembaruan data-data dan informasi terkait kepegawaian;
2. Optimalisasi sistem teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet seperti penyampaian informasi adanya kegiatan upacara atau undangan rapat melalui *platform* pesan daring;
3. Pengintegrasian data kepegawaian; dan
4. Penguatan monitoring dan evaluasi layanan kepegawaian oleh Biro SDMOT antara lain melalui penambahan Standar Operasional Prosedur (SOP).

2) Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai

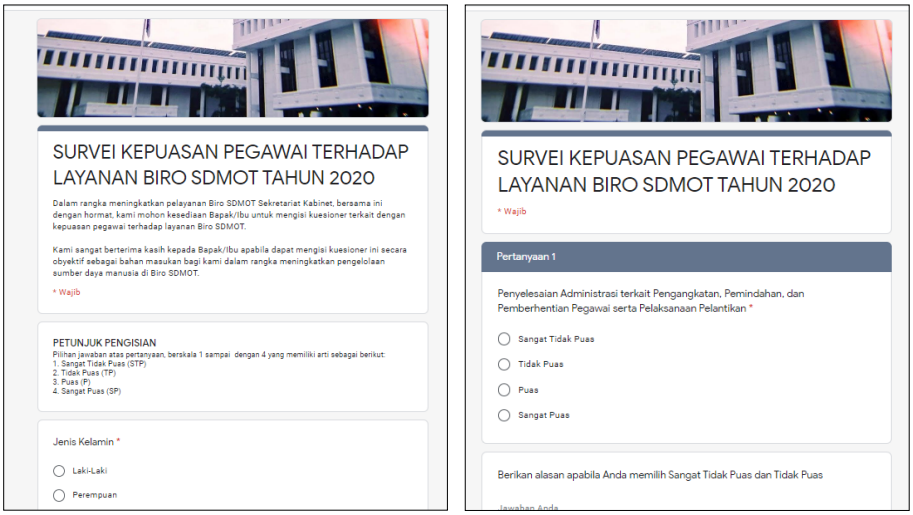

Gambar 3.4 Survei Kepuasan *Output* Layanan Biro SDM OT

Survei untuk mengukur kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai dilakukan secara terpisah dengan responden berbeda melalui survei *Output* Layanan Biro SDM OT. Dalam survei tersebut terdapat item-item pertanyaan yang ditujukan untuk mengukur kepuasan responden terhadap program pengembangan kapasitas pegawai. Survei tersebut dilaksanakan melalui *website* http://bit.ly/SurveiLayananSDMOT2020 yang diselenggakan oleh Biro SDM OT pada tanggal 13 s.d. 15 Januari 2021. Jumlah responden yang terkumpul mengisi survei adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) responden.

Responden survei adalah perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terdiri dari 3 (tiga) orang pejabat struktural meliputi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan 1 (satu) orang pelaksana. Kedua survei dimaksud menggunakan skala *likert* dengan 4 (empat) kategori persepsi, yaitu: Sangat Tidak Puas, Tidak Puas, Puas, dan Sangat Puas. Adapun alasan hanya menggunakan 4 (empat) kategori persepsi adalah untuk menghindari kecenderungan memilih respon netral (nilai tengah). Interpretasi kuesioner tersebut sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.6.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai mengalami peningkatan secara stabil, setelah pada tahun 2018 tergolong kategori *Baik*. Pada tahun 2018 angka indeks kepuasan sebesar 67,68%, kemudian pada tahun berikutnya (tahun 2019) meningkat ke angka 72,48%, dan terakhir pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan. Indeks kepuasan berdasarkan PK 1 sebesar 75,17% dan berdasarkan PK 2 sebesar 74,05%. Gambaran mengenai perbandingan indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Perbandingan Hasil Survei Kepuasan berdasarkan PK 1:

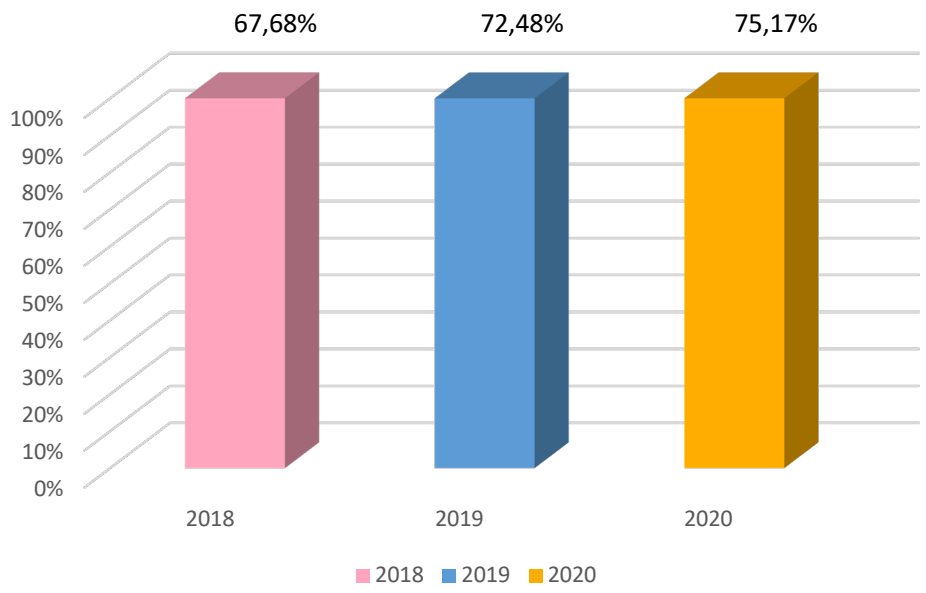

Grafik 3.2

Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP Berdasarkan PK 1

Grafik Perbandingan Hasil Survei Kepuasan berdasarkan PK 2:

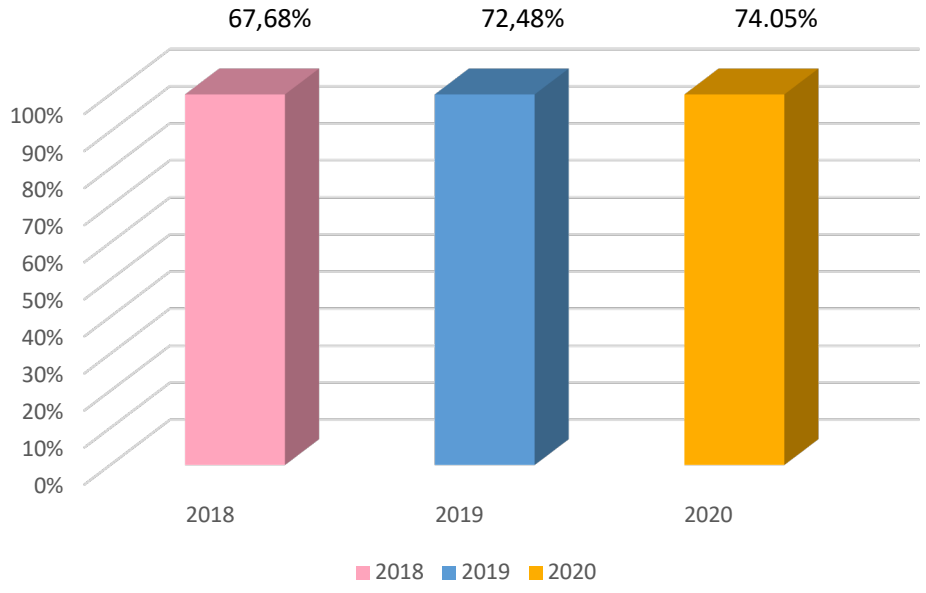

Grafik 3.3

Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP Berdasarkan PK 2

Berdasarkan grafik tersebut, **indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1,57%.** Hasil ini menggambarkan tren peningkatan yang cukup baik. Adanya peningkatan dari tahun ke tahun tersebut disebabkan oleh upaya-upaya berkala yang dilakukan oleh Biro SDM OT dalam menindaklanjuti saran dan kritik dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet serta aspirasi individu yang menerima layanan program pengembangan kapasitas pegawai.

Survei *Output* Layanan Biro SDM OT terdiri dari 17 (tujuh belas) layanan yang dijadikan variabel penilaian. Pada PK 1, variabel penilaian untuk mengukur kepuasan peserta terhadap program pengembangan kapasitas pegawai diantaranya:

NO	LAYANAN	HASIL SURVEI
1	Kualitas Pelaksanaan Pelatihan	69.01%
2	Izin Belajar dan Pemberian Beasiswa	75.70%
3	Penyelesaian Administrasi terkait Permohonan Izin ke Luar Negeri	78.52%
4	Pelaksanaan Magang	77.46%
Nilai Rata-Rata		**75,17%**

Tabel 3.8

Variabel Penilaian Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP Berdasarkan PK 1

Pada PK 2, variabel penilaian untuk mengukur kepuasan peserta terhadap program pengembangan kapasitas pegawai diantaranya:

NO	LAYANAN	HASIL SURVEI
1	Kualitas Pelaksanaan Pelatihan	69.01%
2	Izin Belajar dan Pemberian Beasiswa	75.70%
3	Pelaksanaan Magang	77.46%
Nilai Rata-Rata		**74,05%**

Tabel 3.9

Variabel Penilaian Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP Berdasarkan PK 2

Meskipun nilai rata-rata kepuasan antara penilaian berdasarkan PK 1 dan PK 2 sedikit menurun, hasil tersebut tergolong tidak terlalu esktrim dan merupakan hal yang wajar mengingat adanya perubahan lingkup tusi di Biro SDM OT. Keduanya juga masih tergolong kategori *Sangat Baik*. Namun demikian apabila merujuk pada hasil survei penilaian setiap variabel, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap Kualitas Pelaksanaan Pelatihan memperoleh indeks angka 69.01% (Tinggi). Angka tersebut termasuk kategori Tinggi namun relatif cukup jauh di bawah aspek lainnya yaitu Izin Belajar dan Pemberian Beasiswa sebesar 75,70% (Tinggi) dan Pelaksanaan Magang sebesar 77,46% (Tinggi). Hasil tersebut perlu mendapatkan perhatian dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan nilai rata-rata kepuasan terhadap pelaksanaan program PKP, **hasil yang diperoleh belum mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 80%).** Oleh sebab itu, Biro SDM OT tetap perlu terus meningkatkan kualitas program pengembangan kapasitas pegawai, baik dari sisi substansi program maupun teknis penyelenggaraan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyelenggarakan program PKP sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi masing-masing pegawai (tepat sasaran), sehingga setiap pegawai yang mengikuti program tersebut dapat merasakan manfaatnya untuk peningkatan kinerja;
2. Merencanakan dan melaksanakan program PKP dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan di era digital, karena akan sangat menunjang sistem kerja pada kondisi pandemi saat ini;
3. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat khususnya terkait pemanfaatan Diklat secara berkala;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program PKP;
5. Menyediakan informasi atau kesempatan beasiswa yang lebih luas kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi;
6. Menindaklanjuti proses permohonan izin belajar secara cepat dan akurat.

3) Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai

Sejalan dengan survei kepuasan terhadap pelaksanaan program PKP, pengukuran kepuasan layanan pembinaan pegawai juga dilakukan secara terpisah melalui survei *Output* Layanan Biro SDM OT. Dalam survei tersebut terdapat item-item pertanyaan yang ditujukan untuk mengukur kepuasan responden terhadap layanan pembinaan pegawai. Survei tersebut juga dilaksanakan melalui *website* http://bit.ly/SurveiLayananSDMOT2020 yang diselenggakan oleh Biro SDM OT pada tanggal 13 s.d. 15 Januari 2021. Jumlah responden yang terkumpul mengisi survei sebanyak 71 (tujuh puluh satu) responden.

Responden survei adalah perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terdiri dari 3 (tiga) orang pejabat struktural meliputi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan 1 (satu) orang pelaksana. Kedua survei dimaksud menggunakan skala *likert* dengan 4 (empat) kategori persepsi, yaitu: Sangat Tidak Puas, Tidak Puas, Puas, dan Sangat Puas. Adapun alasan hanya menggunakan 4 (empat) kategori persepsi adalah untuk menghindari kecenderungan memilih respon netral (nilai tengah). Interpretasi kuesioner tersebut sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.6.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, indeks kepuasan layanan pembinaan pegawai cenderung stabil. Pada tahun 2018 angka indeks kepuasan sebesar 77,96%, kemudian pada tahun berikutnya (tahun 2019) mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan ke angka 77,30%, dan terakhir pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan. Indeks kepuasan berdasarkan PK 1 sebesar 78,10% dan berdasarkan PK 2 sebesar 77,25%. Gambaran mengenai perbandingan indeks kepuasan peserta terhadap layanan pembinaan pegawai dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Perbandingan Hasil Survei Kepuasan berdasarkan PK 1:

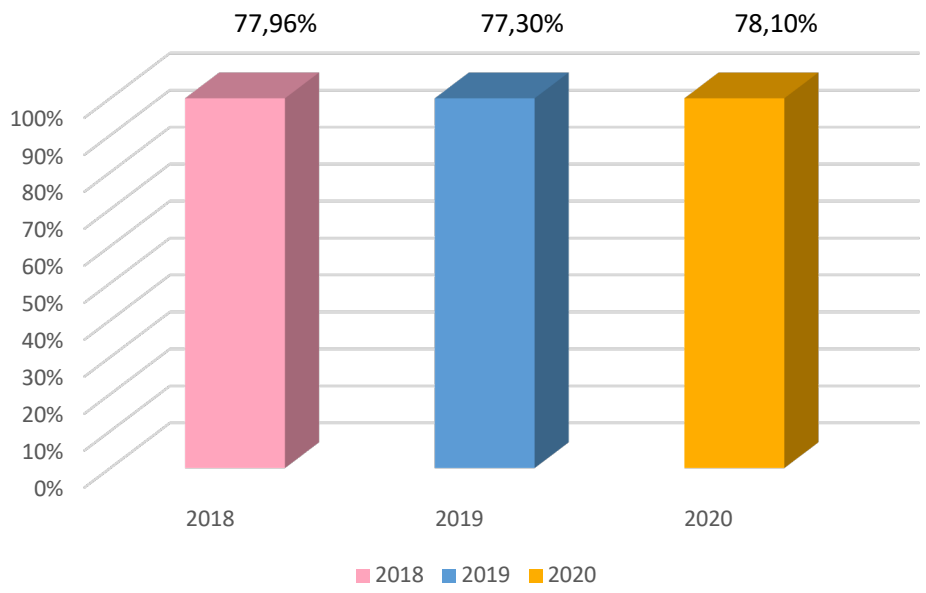

Grafik 3.4

Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai Berdasarkan PK 1

Grafik Perbandingan Hasil Survei Kepuasan berdasarkan PK 2:

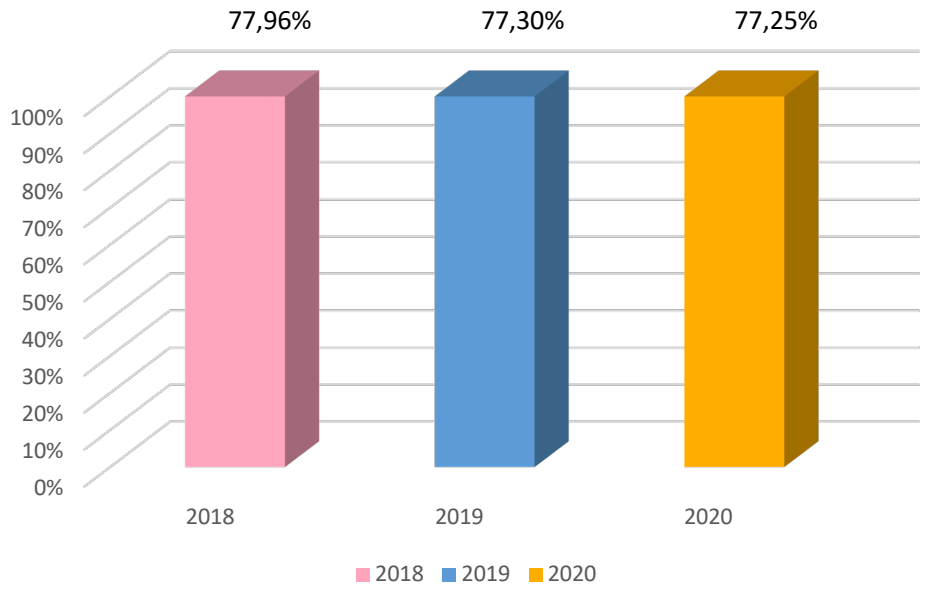

Grafik 3.5

Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai Berdasarkan PK 2

Berdasarkan grafik tersebut, **indeks kepuasan layanan pembinaan pegawai pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,05%.** Penurunan tersebut relatif tidak signifikan dan justru menggambarkan hasil yang cenderung stabil. Hasil tersebut dimungkinkan karena mempertahankan pola pembinaan baik yang sudah ada. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, saat ini ruang lingkup tusi pembinaan pegawai telah mengalami perubahan yaitu berada di bawah unit eselon III (sebelumnya di bawah unit eselon IV).

Pada PK 1, variabel penilaian yang digunakan diantaranya:

NO	LAYANAN	HASIL SURVEI
1	Pengusulan dan Pemberian Tanda Kehormatan	80.99%
2	Permohonan Cuti dan Surat Keterangan	82.75%
3	Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai	76.76%
4	Penyelesaian Permasalahan Pegawai	75.00%
5	Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	75.00%
Nilai Rata-Rata		**78,10%**

Tabel 3.10

Variabel Penilaian Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai Berdasarkan PK 1

Pada PK 2, variabel penilaian yang digunakan diantaranya:

NO	LAYANAN	HASIL SURVEI
1	Pengusulan dan Pemberian Tanda Kehormatan	80.99%
2	Penyelesaian Administrasi terkait Permohonan Izin ke Luar Negeri	78.52%
3	Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai	76.76%
4	Penyelesaian Permasalahan Pegawai	75.00%
5	Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	75.00%
Rata-Rata		**77,25%**

Tabel 3.11

Variabel Penilaian Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai Berdasarkan PK 2

Meskipun nilai rata-rata kepuasan antara penilaian berdasarkan PK 1 dan PK 2 menurun, hasil tersebut tergolong tidak terlalu esktrim dan merupakan hal yang wajar mengingat adanya perubahan lingkup tusi di Biro SDM OT. Keduanya juga masih tergolong kategori *Sangat Baik*. Namun demikian apabila merujuk pada hasil survei penilaian setiap variabel, dapat disimpulkan bahwa kontribusi kinerja terbaik di layanan pembinaan pegawai terdapat pada layanan administrasi cuti dan surat keterangan dengan nilai 82,75% (Sangat Tinggi). Mengingat tusi tersebut sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab lingkup pembinaan pegawai, diharapkan kinerja pada tusi-tusi lainnya juga dapat mengalami peningkatan.

Berdasarkan nilai rata-rata kepuasan terhadap pembinaan pegawai, **hasil yang diperoleh belum mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 80%).** Oleh sebab itu, Biro SDM OT seyogyanya tetap perlu terus meningkatkan performa layanan pembinaan pegawai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Melakukan upaya penanganan permasalahan pegawai secara terintegrasi, dari sisi preventif (berorientasi pemberdayaan serta pengembangan) dan dari sisi kuratif (pemberian keputusan yang tepat bagi penyelesaian masalah pegawai);
2. Menyelenggarakan kegiatan yang mengangkat isu-isu terkait permasalahan di lingkungan kerja;
3. Mengikuti pelatihan konseling bagi pegawai yang menangani tusi pembinaan pegawai maupun pegawai Biro SDM OT secara umum, guna mendukung kinerja dalam melaksanakan pelayanan;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka menyelesaikan administrasi izin pegawai ke luar negeri; dan
5. Optimalisasi *database* pengusulan dan pemberian tanda kehormatan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3.1.2 Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana

Sasaran ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan Internal (Peraturan dan Keputusan Sekretaris Kabinet serta Peraturan dan Keputusan Deputi Bidang Administrasi di bidang organisasi dan tata laksana) dan penyusunan kajian terkait organisasi dan tata laksana.

Uraian mengenai capaian atas sasaran dimaksud sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
1	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%	61,44%	76,80%	Baik
2	Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	86,67%	108,33%	Memuaskan

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (PK 1)/Sasaran 3 (PK 2) Tahun 2020

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Responden survei merupakan perwakilan pejabat/pegawai dari masing-masing unit kerja serta eselon di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hasil survei menunjukkan pencapaian kinerja terhadap peningkatan efektivitas layanan manajemen organisasi dan tata laksana tergolong kategori *Baik* dan *Memuaskan*.

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan				
2018	80%	61,44%	76,80%	Baik
2019	80%	61,44%	76,80%	Baik
2020	80%	61,44%	76,80%	Baik
Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana				
2018	80%	82,28%	102,85%	Memuaskan
2019	80%	86,67%	108,33%	Memuaskan
2020	80%	86,67%	108,33%	Memuaskan

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (PK 1)/Sasaran 3 (PK 2) Tahun 2020

1) Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan

Capaian indikator kinerja efektivitas kelembagaan tahun 2020 menggunakan nilai pada tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar 61,44. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Selain itu, pada bulan September tahun 2020 Sekretariat Kabinet mengalami perubahan SOTK, yang merupakan tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Adanya perubahan tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian tugas, fungsi, dan wewenang pada sebagian besar unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro SDMOT mempertimbangkan bahwa evaluasi kelembagaan belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan Sekretariat Kabinet sedang mengalami masa transisi. Evaluasi kelembagaan dapat dilakukan setelah melalui waktu yang cukup untuk dapat dirasakan efektivitasnya oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. Oleh sebab itu, capaian kinerja tahun 2020 masih menggunakan nilai yang sama dengan tahun 2018 dan 2019.

Penilaian dilakukan melalui survei dengan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Dalam PermenPAN RB tersebut terdapat 2 (dua) dimensi pokok organisasi yang diukur, yakni struktur organisasi dan proses organisasi. Dimensi struktur organisasi meliputi 3 (tiga) subdimensi, yaitu:

1. Kompleksitas

   Banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja.
2. Formalisasi

   Suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan.
3. Sentralisasi

   Tingkat dimana kewenangan dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi.

Sedangkan dimensi proses organisasi meliputi 5 (lima) subdimensi:

1. Keselarasan

   Keselarasan yang dimaksud adalah antara strategi organisasi dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.
2. Tata Kelola dan Kepatuhan

   Memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi.
3. Perbaikan dan Peningkatan Proses

   Melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan.

4. Manajemen Risiko

   Memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

5. Teknologi Informasi

   Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah, sehingga dijadikan indikator dalam evaluasi kelembagaan ini.

Total pertanyaan survei dimaksud adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pertanyaan dengan pembagian sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) pertanyaan untuk mengukur dimensi struktur organisasi, yang terdiri dari:
   a. kompleksitas struktur, terdiri dari 11 pertanyaan;
   b. formalisasi struktur, terdiri dari 7 pertanyaan; dan
   c. sentralisasi struktur, terdiri dari 11 pertanyaan.
2. 30 (tiga puluh) pertanyaan untuk mengukur dimensi proses organisasi, yang terdiri dari:
   a. keselarasan, terdiri dari 8 pertanyaan;
   b. tata kelola dan kepatuhan, terdiri dari 7 pertanyaan;
   c. perbaikan dan peningkatan proses, terdiri dari 4 pertanyaan;
   d. manajemen risiko, terdiri dari 6 pertanyaan; dan
   e. teknologi informasi, terdiri dari 5 pertanyaan.

Hasil yang diperoleh sebesar 61,44% tersebut belum mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 80%). Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan oleh karena itu Biro SDM OT harus meningkatkan upaya-upaya perbaikan yang berkaitan dengan efektivitas kelembagaan. Masa transisi ke dalam struktur baru dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan performa organisasi, termasuk dalam penerbitan Peraturan Internal yang berkaitan dengan kelembagaan, baik yang berasal dari inisiasi Biro SDM OT sendiri maupun usulan unit kerja lain.

Berkenaan dengan kelembagaan, Biro SDM OT saat ini sedang memproses penyetaraan Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet, dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden terkait penyederhanaan birokrasi. Secara garis besar hal-hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengidentifikasi dan memetakan Jabatan Adminstrator yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional (sebanyak 14 jabatan);
2. Melakukan penghitungan penyetaraan hak keuangan;
3. Mengkaji dan menyusun Jabatan Fungsional baru yang sesuai dengan karakteristik Sekretariat Kabinet (sebanyak 3 jabatan);
4. Mengusulkan Jabatan Fungsional yang akan disetarakan dan Jabatan Fungsional baru ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Mengkaji perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, guna menindaklanjuti penyederhanaan birokasi dan selanjutnya penyetaraan Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Fungsional.

Adapun 14 (empat belas) Jabatan Administrator yang diusulkan untuk disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional antara lain:

1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (1 jabatan);
2. Pranata Komputer (11 jabatan);
3. Arsiparis (1 jabatan); dan
4. Pustakawan (1 jabatan).

Sedangkan 3 (tiga) Jabatan Fungsional baru yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Analis Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Analis Aparatur Negara dan Pemerintahan; dan
3. Penata Kelola Persidangan Eksekutif.

2) Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana

Survei untuk mengukur efektivitas manajemen tata laksana dilaksanakan melalui survei evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibagikan kepada sebanyak 25 (dua puluh lima) unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam survei tersebut terdapat 3 (tiga) komponen yang diukur, yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan SOP Organisasi

   Komponen ini berkaitan dengan sejauh mana organisasi telah memenuhi kebutuhan SOP dalam rangka mengawal sistem kerja. Kebutuhan SOP yang telah dipenuhi oleh organisasi akan bermuara pada kepastian alur kinerja, sehingga menghindarkan organisasi dari *fraud* maupun risiko lain yang berpeluang terjadi.

2. Substansi SOP

   Substansi merupakan bagian terpenting dari pembuatan alur SOP. Substansi akan menggambarkan secara rinci proses kerja di dalam sebuah sistem, yang meliputi ketepatan judul, komprehensivitas langkah-langkah prosedur dan kewenangan yang telah mempertimbangkan risiko kerja, hingga pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

3. Penerapan SOP

   Efektivitas SOP dapat diukur dengan sejauh mana ketaatan para pelaku menerapkan ketentuan di dalam setiap *business process.* Efektivitas ketaatan pelaku pada akhirnya berkaitan dengan relevansi SOP untuk tetap dijalankan atau menuntut kebutuhan revisi agar implementasi SOP kontekstual.

Jawaban pada masing-masing pertanyaan kuesioner terbagi menjadi dua, yakni “ya” dan “tidak”. Setiap kedua jawaban tersebut masing-masing memiliki nilai 1. Total dari masing-masing jawaban tersebut dijumlahkan dan dihitung menggunakan persentase. Jumlah persentase akan menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan organisasi dalam melaksanakan SOP di setiap kegiatannya.

Rincian hasil survei dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Satuan Organisasi	Pemenuhan	Substansi	Penerapan
1	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	75%	83%	100%
2	Deputi Bidang Perekonomian	93%	87%	90%
3	Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	93%	87%	90%
4	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	81%	96%	100%
5	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	95%
6	Deputi Bidang Administrasi	79%	78%	67%

Tabel 3.14
Variabel Penilaian Survei Manajemen Tata Laksana Berdasarkan PK 2

Capaian indikator kinerja efektivitas manajemen tata laksana tahun 2020 menggunakan nilai pada tahun 2019, yaitu sebesar 88,67%. Hal ini didasari oleh pertimbangan yang kurang lebih sama dengan penetapan nilai pada indikator kinerja efektivitas kelembagaan. Pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet mengalami perubahan SOTK. Perubahan tersebut tentunya turut berimplikasi pada ketatalaksanaan organisasi. Adanya perubahan tugas dan fungsi, wewenang, skala kerja, dan sebagainya memerlukan penyesuaian pada SOP-SOP yang selama ini telah berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro SDM OT mempertimbangkan bahwa evaluasi manajemen tata laksana belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan Sekretariat Kabinet sedang mengalami masa transisi. Evaluasi manajemen tata laksana dapat dilakukan setelah SOP baru telah dijalankan dalam kurun waktu yang cukup untuk dinilai efektivitasnya. Oleh sebab itu, capaian kinerja tahun 2020 masih menggunakan nilai yang sama dengan tahun 2019.

Hasil yang diperoleh sebesar 86,67% telah mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 80%). Hasil tersebut dikarenakan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet telah melaksanakan pemenuhan SOP dan substansi SOP dengan baik. Selain itu, SOP telah diterapkan dalam setiap *business process* yang unit kerja laksanakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan yang muncul, di antaranya:

1. Terhadap pemenuhan kebutuhan SOP, penyusunan SOP belum mempertimbangkan perubahan lingkungan/ keterkaitan hubungan antar sub-sub unit;
2. Terhadap SOP, terdapat unit kerja yang belum melakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
3. Terhadap penerapan SOP, terdapat unit kerja mengalami kesulitan dalam pelaksaan SOP.

Dalam meningkatkan pelaksanaan SOP yang lebih baik, Biro SDM OT perlu melakukan evaluasi antara lain melalui:

1. SOP perlu dibuat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan serta keterkaitan hubungan antar sub-sub unit. Dalam hal ini, seluruh unit kerja perlu diikutsertakan dalam penyusunan SOP yang berlaku di unit kerjanya;
2. Perlu penyempurnaan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2013, khususnya terkait dengan fleksibilitas perubahan SOP sesuai dengan dinamika organisasi, serta mekanisme dan metodologi penyusunan SOP yang bersifat antar unit kerja; dan
3. Melaksanakan pemantuan terhadap pelaksanaan SOP agar dapat dilakukan evaluasi secepat mungkin apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan SOP.

3.1.2 Sasaran: Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2020, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir. Fungsi tersebut diejawentahkan ke dalam sasaran kegiatan berupa *"terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas"*.

Penyusunan sasaran kegiatan di dalam Perjanjian Kinerja periode Januari s.d. September 2020 (PK 1) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, dimana fungsi pemberian dukungan terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi belum diatur. Oleh sebab itu, sasaran kegiatan mengenai hal tersebut belum ditetapkan dalam PK 1. Kemudian PK 1 mengalami penyesuaian seiring dengan adanya perubahan SOTK pada bulan September 2020, sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020.

Penyesuaian tersebut menghasilkan PK periode Oktober s.d. September 2020 (PK 2) yang didalamnya telah memuat sasaran kegiatan terkait fungsi pemberian dukungan terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi. Sasaran kegiatan dimaksud mempunyai indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	100%	125%	Memuaskan

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (PK 2) Tahun 2020

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020, terdapat 208 (dua ratus delapan) Keppres yang diselesaikan tepat waktu dan seluruhnya disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, **realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 100%.** Hasil penghitungan menggambarkan pencapaian kinerja berupa Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu tergolong kategori *Memuaskan*.

3.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Uraian berikut akan memberikan gambaran mengenai kondisi anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana di lingkungan Biro SDM OT Tahun 2020. Penjelasan juga menggambarkan bagaimana penggunaan seluruh sumber daya dimaksud dalam mendukung kinerja Biro SDM OT guna mencapai target-target yang telah ditetapkan.

3.2.1. Realisasi Anggaran

Biro SDM OT menjalankan program *Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana* Sekretariat Kabinet. Program tersebut terdiri *Layanan Manajemen SDM*, *Layanan Manajemen Organisasi*, dan *Layanan Perkantoran*. Pagu awal yang diperjanjikan dalam PK Biro SDM OT adalah Rp.174.853.570.000. Anggaran tersebut menopang kegiatan Biro SDM OT tahun 2020 yang termuat di dalam sasaran kegiatan. Berikut ini tabel alokasi beserta realisasi anggaran per sasaran kegiatan tahun 2020:

Pagu Awal*	Pagu Revisi*	Realisasi*	% Realisasi	% Capaian Kinerja*	
				PK 1	PK 2
Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas					
1.387.720.000	1.117.480.000	1.108.071.000	99,15%	125%	
Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia					
173.361.577.000	170.807.614.000	159.144.982.747	93,71%	101,59%	100,77%
Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana					
104.273.000	45.837.000	39.414.500	85,98%	92,56%	
TOTAL					
174.853.570.000	**171.970.931.000**	**160.292.467.247**	**93,19%**	**104,98%**	

* dalam rupiah

* rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran Biro SDM OT Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Biro SDM OT setelah revisi pengalihan anggaran menjadi Rp.171.970.931.000. Sedangkan realisasi/penyerapan anggaran sebesar Rp.160.292.467.247 atau sama dengan 93,19%, dengan penyerapan pada masing-masing sasaran kegiatan seperti yang dapat dilihat lebih lanjut di dalam tabel. Hasil ini menggambarkan bahwa penyerapan anggaran di Biro SDM OT tersebut sudah baik. Hal ini didukung oleh optimalisasi alokasi anggaran kegiatan yang tidak dapat dipakai akibat dari adanya pandemi COVID-19 untuk kegiatan-kegiatan penanganan pandemi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran sejauh mana penggunaan anggaran berjalan dengan efektif dan efisien dapat dilihat dari pencapaian target. Sebuah kegiatan dapat disebut efektif apabila kegiatan yang dilaksanakan mampu membuat tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan. Dengan kata lain, efektivitas menitikberatkan pada hasil. Sedangkan efisien adalah kondisi dimana sebuah kegiatan mampu menghasilkan *output* yang optimal dengan *input* minimum. Dengan kata lain, efisiensi menitikberatkan pada proses.

Untuk dapat disimpulkan, berdasarkan kategori capaian kinerja, sasaran kegiatan *"Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas"* dan *"Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia"* memperoleh hasil *Memuaskan*, sedangkan untuk sasaran kegiatan "Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana" memperoleh hasil *Sangat Baik*.

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2020, Biro SDM OT didukung oleh sebanyak 38 orang, diantaranya 29 orang PNS dan 9 orang PTT.

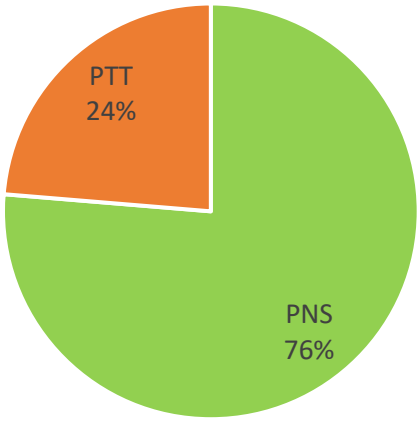

Grafik 3.6 Diagram Profil Pegawai di Lingkungan Biro SDM OT

Pada tahun 2020, proses pengalihan Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Fungsional sebagai bagian dari program prioritas (*Quick Wins*) Sekretariat Kabinet telah dimulai dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Biro SDM OT nantinya akan didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pengalihan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

3.2.3. Sarana Prasarana

Sarana Alat Pengolah Data (APD) yang dimiliki Biro SDM OT sepanjang tahun 2020 sudah cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai. Seiring dengan adanya restrukturisasi organisasi, Biro SDM OT turut mengalami perluasan struktur. Sejak bulan Oktober 2020, terdapat sebanyak 4 (empat) unit eselon III/Bagian di Biro SDM OT. Perluasan struktur dimaksud telah didukung oleh penambahan ruangan dan komputer bagi setiap pejabat/pegawai.

Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Biro SDM OT diberikan 14 laptop, 14 Ipad, dan 1 kendaraan operasional.

Namun demikian, terdapat sarana prasarana yang belum tersedia dengan optimal, yaitu ruang tunggu khusus untuk tamu Biro SDM OT, karena ruang tunggu tamu yang sebelumnya telah diberdayakan menjadi ruangan Kepala Bagian Kepegawaian. Ruang tunggu tamu dimaksud memiliki fungsi yang penting mengingat Biro SDM OT selalu menerima tamu setiap hari dalam jumlah yang cukup banyak.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Biro SDM OT Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas rencana kinerja yang telah ditetapkan. Biro SDM OT senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Biro SDM OT Tahun 2020 menjabarkan capaian atas indikator kinerja pada 3 (tiga) sasaran kegiatan. Pada prinsipnya ketiga sasaran strategis tersebut dapat dicapai.

Sasaran *"Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas"* memperoleh capaian kinerja sebesar **125% (Memuaskan)**, sasaran *"Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia"* sebesar **101,59% (Memuaskan)** pada penilaian berdasarkan PK periode Januari s.d. September 2020 dan sebesar **100,77% (Memuaskan)** pada penilaian berdasarkan PK periode Oktober s.d. Desember 2020, dan sasaran *"Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana"* sebesar **92,56% (Sangat Baik).**

Meskipun capaian yang diperoleh relatif sudah baik, upaya perbaikan dan peningkatan kinerja harus terus dilakukan. Memperhatikan hasil capaian kinerja dan dalam rangka meningkatkan kinerja Biro SDM OT pada Tahun 2021, saran dan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

a) Optimalisasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian;
b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan;
c) Penguatan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
d) Meningkatkan kualitas pengelolaan pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kepada Tim Penilai Akhir.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumen Perjanjian Kinerja Biro SDM OT Tahun 2020

PK Periode Januari s.d. September 2020

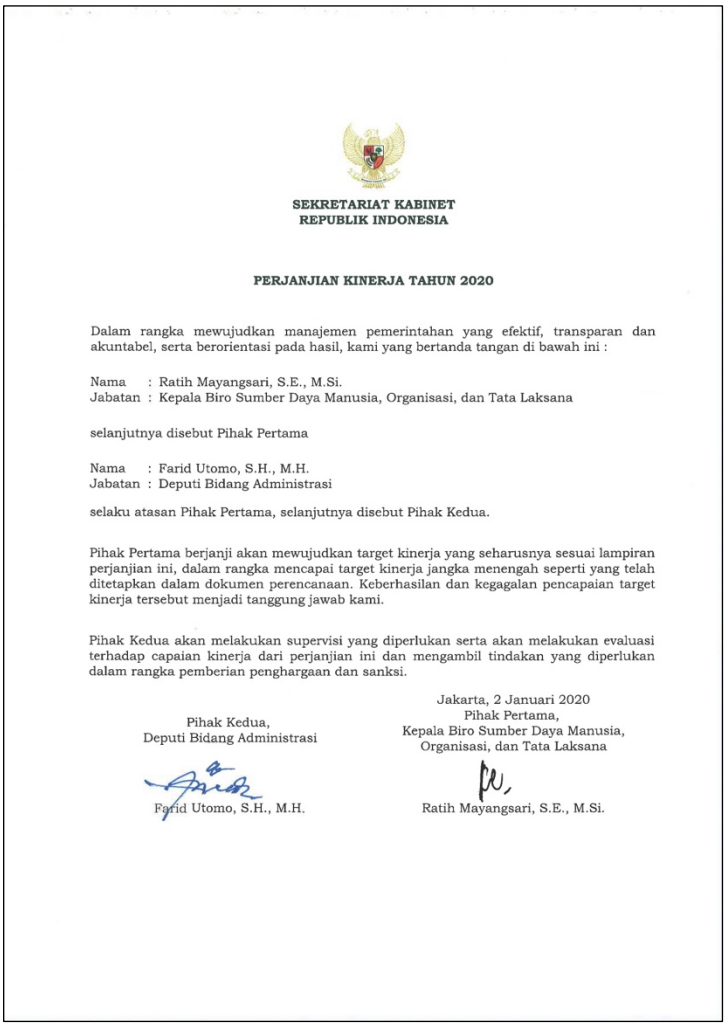

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

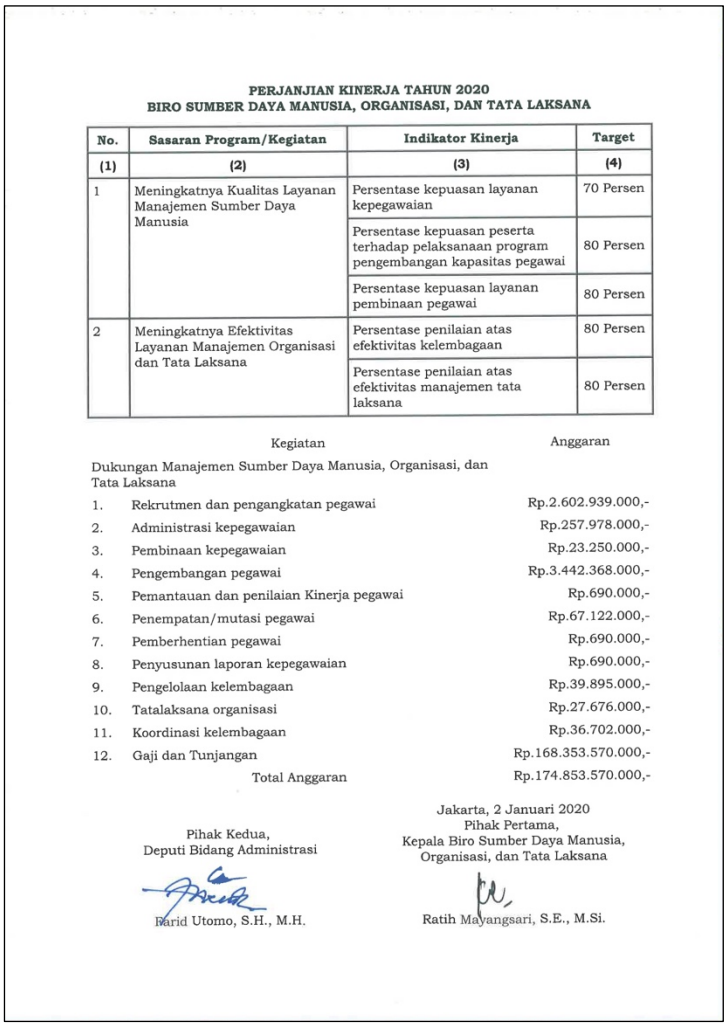

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70 Persen
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80 Persen
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80 Persen
2	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80 Persen
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80 Persen

	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana		
1.	Rekrutmen dan pengangkatan pegawai	Rp.2.602.939.000,-
2.	Administrasi kepegawaian	Rp.257.978.000,-
3.	Pembinaan kepegawaian	Rp.23.250.000,-
4.	Pengembangan pegawai	Rp.3.442.368.000,-
5.	Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai	Rp.690.000,-
6.	Penempatan/mutasi pegawai	Rp.67.122.000,-
7.	Pemberhentian pegawai	Rp.690.000,-
8.	Penyusunan laporan kepegawaian	Rp.690.000,-
9.	Pengelolaan kelembagaan	Rp.39.895.000,-
10.	Tatalaksana organisasi	Rp.27.676.000,-
11.	Koordinasi kelembagaan	Rp.36.702.000,-
12.	Gaji dan Tunjangan	Rp.168.353.570.000,-
	Total Anggaran	Rp.174.853.570.000,-

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

PK Periode Oktober s.d. Desember 2020

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70 Persen
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80 Persen
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80 Persen
2	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80 Persen
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80 Persen
3	Terwujudnya rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80 Persen

	Kegiatan	Anggaran
	Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	
1.	Rekrutmen dan pengangkatan pegawai	Rp.2.428.290.000,-
2.	Administrasi kepegawaian	Rp.119.800.000,-
3.	Pembinaan kepegawaian	Rp.611.889.000,-
4.	Pengembangan pegawai	Rp.610.458.000,-
5.	Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai	Rp.22.000,-
6.	Penempatan/mutasi pegawai	Rp.46.526.000,-
7.	Pemberhentian pegawai	Rp.22.000,-
8.	Penyusunan laporan kepegawaian	Rp.22.000,-
9.	Pengelolaan kelembagaan	Rp.4.995.000,-
10.	Tatalaksana organisasi	Rp.4.140.000,-
11.	Koordinasi kelembagaan	Rp.36.702.000,-
12.	Gaji dan Tunjangan	Rp.168.353.570.000,-
	Total Anggaran	Rp.172.216.436.000,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja Biro SDM OT Tahun 2020

Berdasarkan PK 1 (Januari s.d. September 2020):

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Penyerapan
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70%	79,25%	113,21%	Dukungan Manajemen	Rp 170.807.614.000	Rp 159.144.982.747	99,15%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%	75,17%	93,96%				
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%	78,10%	97,62%				
2	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%	61,44%	76,80%		Rp 45.837.000	Rp 39.414.500	99,15%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	86,67%	108,33%				

Capaian Kinerja Berdasarkan PK 2 (Oktober s.d. Desember 2020):

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Penyerapan
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	100%	125%	Penyelengga-raan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp 1.117.480.000	Rp 1.108.071.000	99,15%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Penyerapan
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70%	79,25%	113,21%	Dukungan Manajemen	Rp 170.807.614.000	Rp 159.144.982.747	99,15%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%	74.05%	92,56%				
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%	77,25%	96,56%				
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%	61,44%	76,80%		Rp 45.837.000	Rp 39.414.500	99,15%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	86,67%	108,33%				

Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran Biro SDM OT Tahun 2020

Rincian anggaran yang dipergunakan untuk setiap Komponen RAB:

Kode	Kegiatan/Komponen	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran	Persentase Penyerapan
5010	Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	171.970.931.000	160.292.467.247	93.19%
954.051	Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai	2.476.260.000	2.457.709.650	99.25%
954.052	Administrasi Kepegawaian	106.790.000	84.036.250	78.69%
954.053	Pembinaan pegawai	455.960.000	382.956.000	83.98%
954.054	Pengembangan pegawai	510.898.000	423.725.761	82.93%
954.055	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pegawai	22.000	0	0.00%
954.056	Penempatan/mutasi Pegawai	21.550.000	18.750.000	87.00%
954.057	Pemberhentian Pegawai	22.000	0	0.00%
954.058	Penyusunan Laporan Kepegawaian	22.000	0	0.00%
960.051	Pengelolaan Kelembagaan	26.411.000	24.492.500	92.73%
960.052	Tata Laksana Organisasi	4.140.000	2.310.000	55.79%
960.053	Koordinasi Kelembagaan	15.286.000	12.612.000	82.50%
994.01	Gaji dan Tunjuangan	168.353.570.000	156.885.875.086	93.16%
TOTAL		**171.970.931.000**	**160.292.467.247**	**93.19%**

Rincian anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran kegiatan:

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran	Persentase Penyerapan
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Rp 1.117.480.000	Rp 1.108.071.000	99,15%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Rp 170.807.614.000	Rp 159.144.982.747	99,15%
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Rp 45.837.000	Rp 39.414.500	99,15%
TOTAL		**Rp 171.970.931.000**	**Rp 160.292.467.247**	**93,19%**

Lampiran 4: Penyelesaian Administrasi Dokumen Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah
1	Penyelesaian administrasi usulan dokumen Kenaikan Pangkat Periode April 2020	34 Dokumen
2	Penyelesaian administrasi usulan dokumen Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2020	74 Dokumen
3	Penyelesaian administrasi usulan Pensiun PNS	9 Dokumen
4	Penyelesaian administrasi Pelaksanaan Pelantikan	5 Dokumen
5	Penyelesaian administrasi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	304 Dokumen
6	Penyelesaian administrasi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)	324 Dokumen
7	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Gaji Pokok	14 Dokumen
8	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Tunjangan Kinerja	12 Dokumen
9	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Uang Makan	12 Dokumen
10	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur	12 Dokumen
11	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Hak Keuangan Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden	12 Dokumen
12	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Honorarium Pramubakti dan Pengemudi	12 Dokumen
13	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pramubakti dan Pengemudi	12 Dokumen
14	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Uang Makan Pramubakti dan Pengemudi	12 Dokumen
15	Penyelesaian administrasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan	191 Dokumen
17	Pemutakhiran database pegawai	12 Dokumen

Lampiran 5: Penyelesaian Keputusan Sekretaris Kabinet

No	Perihal	Nomor	Tanggal Penetapan
1	Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	1	07 Januari 2020
2	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	2	07 Januari 2020
3	Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	3	08 Januari 2020
4	Pengangkatan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden	4	08 Januari 2020
5	Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	5	08 Januari 2020
6	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	6	16 Januari 2020
7	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	7	16 Januari 2020
8	Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	8	17 Januari 2020
9	Pemberhentian Asisten Staf Khusus dan Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	9	17 Januari 2020
10	Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	10	21 Januari 2020
11	Pengangkatan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden	14	28 Januari 2020
12	Pengangkatan Staf Khusus Sekretaris Kabinet	17	31 Januari 2020
13	Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila	18	7 Februari 2020
14	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	19	7 Februari 2020

15	Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Kabinet	20	12 Februari 2020
16	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	21	26 Februari 2020
17	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	22	26 Februari 2020
18	Pemberhentian dan Pengangkatan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden	23	4 Maret 2020
19	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	24	9 Maret 2020
20	Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	25	9 Maret 2020
21	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	27	16 Maret 2020
22	Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	28	18 Maret 2020
23	Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	29	30 Maret 2020
24	Pemberhentian dari Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	30	30 Maret 2020
25	Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	31	30 Maret 2020
26	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	32	30 Maret 2020
27	Pengangkatan Staf Khusus Sekretaris Kabinet	33	1 April 2020
28	Pemberhentian dari Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	34	9 April 2020
29	Pemberhentian dari Jabatan Administrator di Lingkungan Sekretariat Kabinet	35	9 April 2020
30	Pemberhentian Asisten Staf Khusus Presiden	36	13 April 2020
31	Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	37	13 April 2020
32	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	38	20 April 2020

33	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	39	20 April 2020
34	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	40	04 Mei 2020
35	Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	41	04 Mei 2020
36	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	42	04 Mei 2020
37	Pemberhentian Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	43	11 Mei 2020
38	Penunjukan Pelaksana Harian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet	44	11 Mei 2020
39	Pemberhentian dari Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	45	18 Mei 2020
40	Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	47	2 Juni 2020
41	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	48	2 Juni 2020
42	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	49	2 Juni 2020
43	Pemberhentian Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Sekretariat Kabinet	50	11 Juni 2020
44	Pemberhentian Asisten Staf Khusus Presiden	54	22 Juni 2020
45	Perubahan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabine	55	22 Juni 2020
46	Penunjukan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	57	29 Juni 2020
47	Penunjukan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	58	29 Juni 2020

48	Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kabinet	60	9 Juli 2020
49	Pemberhentian dari Jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Kabinet	62	16 Juli 2020
50	Pemberhentian dan Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	63	17 Juli 2020
51	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	64	17 Juli 2020
52	Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kabinet	65	10 Agustus 2020
53	Pemberhentian dari Jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Kabinet	66	10 Agustus 2020
54	Pemberhentian dari Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Kabinet	67	10 Agustus 2020
55	Pemberhentian dan Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	68	10 Agustus 2020
56	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	69	25 Agustus 2020
57	Pemberhentian Asisten Staf Khusus Presiden	70	3 September 2020
58	Pengangkatan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden	71	3 September 2020
59	Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Wakil Presiden	72	3 September 2020
60	Pemberhentian dari Jabatan Administrator di Lingkungan Sekretariat Kabinet	74	7 September 2020
61	Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat kabinet	75	7 September 2020
62	Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat kabinet	76	7 September 2020
63	Pemberhentian dan Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Wakil Presiden	77	7 September 2020
64	Pengangkatan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden	78	7 September 2020

65	Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	79	7 September 2020
66	Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	80	7 September 2020
67	Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	81	7 September 2020
68	Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat kabinet	82	7 September 2020
69	Pemberhentian Pejabat Fungsional di lingkungan setkab	83	16 September 2020
70	Penugasan PNS BPKP pada Sekretariat Kabinet	91	26 Oktober 2020
71	Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	92	26 Oktober 2020
72	Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	93	26 Oktober 2020
73	Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat kabinet	94	26 Oktober 2020
74	Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	95	5 November 2020
75	Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	98	27 November 2020
76	Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	100	23 Desember 2020
77	Pemberhentian dan Pengangkatan Asisten SKWP	102	30 Desember 2020

Lampiran 6: Penyelenggaraan Program Pengembangan Kapasitas Pegawai

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	Singapore Cooperation Programme on Social Cohesion and Racial Harmony	1 orang	6 s.d. 10 Januari 2020	Singapura
2	Seminar Keuangan "Keuangan di Era Jajan Masa Kini"	Umum	19 Februari 2020	Jakarta
3	Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN	6 orang	1 s.d. 7 Maret 2020	Bogor
4	Online Seminar Sharing Session (WFH - New Way of Work) - Oranye	4 orang	28 April 2020	Virtual - Jakarta
5	Online Seminar Sharing Session (New Way in Measuring Employee Productivity & Performance) - Oranye	4 orang	5 Mei 2020	Virtual - Jakarta
6	ITD Online Sharing Session - Leading With Empathy During This Pandemic	5 orang	7 Mei 2020	Virtual - Malaysia
7	Google Cloud	12 orang	18.750.000	Virtual - Jakarta
8	SERVICE COMMUNICATION FOR BETTER UNDERSTANDING	4 orang	30 Mei s.d. 30 Juni	Virtual - Jakarta
9	KEMENKEU CORPU TALK "JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERBENDAHARAAN SEBAGAI WUJUD PROFESIONALISME ASN BIDANG KEUANGAN NEGARA"	3 orang	9 s.d. 23 Juni 2020 dan 30 Juni 2020	Virtual - Jakarta
10	Situasi Keamanan Laut Cina Selatan Ditengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Politik Hukum Internasional Serta Sikap Indonesia	1 orang	18 Juni 2020	Virtual - Jakarta
11	WEBINAR FACING THE CHALLENGE, TAKE THE OPPORTUNITY	5 orang	17 s.d. 18 Juni 2020	Virtual - Jakarta
12	E-Learning Pengantar Manajemen Keuangan Negara	6 orang	29 Juni s.d. 3 Juli 2020	Virtual - Jakarta

13	VIRTUAL CONFERENCE TOURISM INDONESIA REDEFINED	4 orang	25 Juli 2020	Virtual - Jakarta
14	Legal Drafting	20 orang	25 s.d. 26 Juli 2020	Virtual - Jakarta
15	E-Learning Dasar-Dasar Penyusunan APBN	6 orang	27 s.d. 30 Juli 2020	Virtual - Jakarta
16	Diklat Teknis Grammar for Translation Angkatan I Th 2020	2 orang	3 s.d. 7 Agustus 2020	Virtual - Jakarta
17	Pelatihan Program Percepatan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dalam Rangka Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja	2 orang	5 s.d. 14 Agustus 2020	Virtual - Jakarta
18	Bimbingan Teknis Nasional Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6 orang	18 s.d. 21 Agustus 2020	Virtual - Jakarta
19	Workshop HR Learning Hub (Effective Way of Coaching Across Generation)	15 orang	24 September 2020	Virtual - Jakarta
20	Workshop HR Learning Hub (Competency Dictionary Development in Crisis Era)	15 orang	22 Oktober 2020	Virtual - Jakarta
21	Training Needs Analysis	15 orang	18.19 November 2020	Virtual - Jakarta
22	Analisa Kebijakan Publik (Review Permen)	22 orang	9 s.d. 11 November 2020	Virtual - Jakarta
23	Workshop HR Learning Hub (Talent Management)	11 orang	26 November 2020	Virtual - Jakarta
24	Workshop HR Learning Hub (Employee Engagement)	12 orang	17 Desember 2020	Virtual - Jakarta

Lampiran 7: Penanganan Kasus Disiplin dan Hukum Pegawai

No	Nama Kasus	Waktu Mulai Penanganan
1	Perceraian Sdri. N	Desember 2020
2	Tunggakan Koperasi Sdr. A, Sdr. E., dan Sdr. A	November 2020
3	Pemberhentian PTT a.n. Sdr. M.	November 2020
4	Pembinaan Sdr. N terkait tunggakan pinjaman online	Oktober 2020
5	Perbuatan Tidak Menyenangkan Pelecehan Seksual oleh Sdr. D	Desember 2020
6	Pembinaan Kinerja Sdr. E	Juni 2020
7	Izin Perceraian Sdr. H	Desember 2020

Lampiran 8: Penerbitan Peraturan Internal

NO.	JENIS PERATURAN	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
1	Peraturan Sekretaris Kabinet	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	1	02 Juni 2020
2	Peraturan Sekretaris Kabinet	Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024	2	10 Juli 2020
3	Peraturan Sekretaris Kabinet	Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024	3	03 Agustus 2020
4	Peraturan Sekretaris Kabinet	Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020	4	17 September 2020
5	Peraturan Sekretaris Kabinet	Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2020	5	04 November 2020
6	Keputusan Sekretaris Kabinet	Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2020	13	24 Januari 2020
7	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet	15	28 Januari 2020
8	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud di Lingkungan Sekretariat Kabinet dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	16	29 Januari 2020
9	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	26	11 Maret 2020
10	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Kabinet	46	19 Mei 2020

11	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara yang Dialihkan Status Penggunaannya kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	53	19 Juni 2020
12	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024	89	08 Oktober 2020
13	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet	90	08 Oktober 2020
14	Keputusan Sekretaris Kabinet	Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet	96	05 November 2020
15	Keputusan Sekretaris Kabinet	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya	97	05 November 2020
16	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin dan Barang Persediaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	103	30 Desember 2020
17	Peraturan Deputi Bidang Administrasi	Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Sekretariat Kabinet	5	04 Februari 2020
18	Peraturan Deputi Bidang Administrasi	Pemotongan Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1	13 Februari 2020

19	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 114 Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2020	3	24 Januari 2020
20	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 114 Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2020	4	24 Januari 2020
21	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet	5	24 Januari 2020
22	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Kabinet	6	07 Februari 2020
23	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Penetapan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2020	7	11 Februari 2020
24	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Administrasi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP.28/ADM/X/2019 tentang Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2020	8	06 Maret 2020
25	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2020	9	07 April 2020
26	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah	10	16 Juni 2020

		Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet		
27	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Penerjemah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 2020	11	30 Juli 2020
28	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Sekretariat Kabinet Tahun 2020	13	04 November 2020
29	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2021	14	17 November 2020
30	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabinet dan Pemberhentian Staf Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 114 Sekretariat Kabinet	15	01 Desember 2020
31	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Penyusunan Sistem Informasi Pemantauan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Memerlukan Persetujuan Presiden	16	01 Desember 2020
32	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pejabat/Pegawai Penerima Biaya Paket Data dan Komunikasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Periode September-Desember 2020	18	28 Desember 2020
33	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Optimalisasi Pengelolaan Arsip di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1	04 Februari 2020
34	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19	2	16 Maret 2020

35	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19	3	30 Maret 2020
36	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19	4	21 April 2020
37	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan pada DIPA SATKER Sekretariat Kabinet Dalam Masa Darurat Covid-19	5	18 Mei 2020
38	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet Dalam Tatanan Normal Baru	6	04 Juni 2020
39	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Pemanfaatan Video Conference Dalam Penyelenggaraan Rapat/Pertemuan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	7	05 Juni 2020
40	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Pemberian Layanan Swab/PCR Test Bagi Pegawai Sekretariat Kabinet dan Keluarga Dalam Masa Pandemi Covid-19	9	30 Desember 2020
41	Instruksi Sekretaris Kabinet	Langkah-Langkah Yang Perlu Dilakukan Oleh Deputi Bidang Administrasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan	1	02 November 2020

Lampiran 9: Penerbitan Keputusan Presiden (TPA)

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
1	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan	1 TPA	06 January 2020
2	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	2 TPA	06 January 2020
3	Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3 TPA	16 January 2020
4	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia	4 TPA	21 January 2020
5	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	5 TPA	21 January 2020
6	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6 TPA	22 January 2020
7	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	7 TPA	22 January 2020
8	Pengangkatan Pejabat PimpinanTinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	8 TPA	22 January 2020
9	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	9 TPA	22 January 2020
10	Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah	10 TPA	22 January 2020
11	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah	11 TPA	22 January 2020

12	Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	12 TPA	22 January 2020
13	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan	13 TPA	23 January 2020
14	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	14 TPA	23 January 2020
15	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	15 TPA	23 January 2020
16	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	16 TPA	23 January 2020
17	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut	17 TPA	23 January 2020
18	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	18 TPA	23 January 2020
19	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara	19 TPA	23 January 2020
20	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 TPA	23 January 2020
21	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku	21 TPA	23 January 2020
22	Pengangkatan Pejabat PimpinanTinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan	22 TPA	23 January 2020
23	Pengangkatan Pejabat PimpinanTinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu	23 TPA	23 January 2020

24	Pengangkatan Pejabat PimpinanTinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	24 TPA	24 January 2020
25	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Badan Standardisasi Nasional	25 TPA	24 January 2020
26	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	26 TPA	24 January 2020
27	Pengangkatan Pejabat PimpinanTinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	27 TPA	24 January 2020
28	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	28 TPA	30 January 2020
29	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	29 TPA	30 January 2020
30	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	30 TPA	30 January 2020
31	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	31 TPA	30 January 2020
32	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	32 TPA	30 January 2020
33	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara	33 TPA	30 January 2020
34	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara	34 TPA	30 January 2020
35	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama	35 TPA	05 February 2020
36	Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	36 TPA	05 February 2020

37	Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi	37 TPA	05 February 2020
38	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	38 TPA	05 February 2020
39	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	39 TPA	05 February 2020
40	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	40 TPA	13 February 2020
41	Penunjukan Pelaksanan Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	41 TPA	13 February 2020
42	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	42 TPA	18 February 2020
43	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	43 TPA	20 February 2020
44	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan DalamJabatan PimpinanTinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	44 TPA	20 February 2020
45	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan DalamJabatan PimpinanTinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	45 TPA	20 February 2020
46	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	46 TPA	20 February 2020
47	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	47 TPA	20 February 2020
48	Pengangkatan Pejabat Pimpinan tInggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	48 TPA	28 February 2020

49	Pengangkatan Pejabat Pimpinan tInggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara	49 TPA	28 February 2020
50	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial	50 TPA	28 February 2020
51	Penunjukan Pelaksanan Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum	51 TPA	28 February 2020
52	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	52 TPA	28 February 2020
53	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	53 TPA	28 February 2020
54	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian	54 TPA	28 February 2020
55	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	55 TPA	28 February 2020
56	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	56 TPA	28 February 2020
57	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	57 TPA	28 February 2020
58	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	58 TPA	28 February 2020
59	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	59 TPA	28 February 2020
60	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	60 TPA	28 February 2020
61	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	61 TPA	02 March 2020

62	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	62 TPA	11 March 2020
63	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum	63 TPA	18 March 2020
64	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	64 TPA	18 March 2020
65	Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Standardisasi Nasional	65 TPA	18 March 2020
66	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan	66 TPA	24 March 2020
67	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	67 TPA	30 March 2020
68	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan	68 TPA	30 March 2020
69	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	69 TPA	02 April 2020
70	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	70 TPA	07 April 2020
71	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama	71 TPA	07 April 2020
72	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	72 TPA	13 April 2020
73	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	73 TPA	21 April 2020
74	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	74 TPA	21 April 2020
75	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	75 TPA	27 April 2020

76	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung	76 TPA	27 April 2020
77	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	77 TPA	29 April 2020
78	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan	78 TPA	29 April 2020
79	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik	79 TPA	29 April 2020
80	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian	80 TPA	29 April 2020
81	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	81 TPA	29 April 2020
82	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lembaga Ketahanan Nasional	82 TPA	29 April 2020
83	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan	83 TPA	29 April 2020
84	Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	84 TPA	29 April 2020
85	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	85 TPA	29 April 2020
86	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	86 TPA	05 May 2020
87	Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia	87 TPA	06 May 2020
88	Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	88 TPA	19 May 2020

89	Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama	89 TPA	19 May 2020
90	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	90 TPA	19 May 2020
91	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	91 TPA	19 May 2020
92	Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden	92 TPA	19 May 2020
93	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	93 TPA	20 May 2020
94	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	94 TPA	03 June 2020
95	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	95 TPA	03 June 2020
96	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	96 TPA	03 June 2020
97	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	97 TPA	03 June 2020
98	Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	98 TPA	03 June 2020
99	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	99 TPA	03 June 2020
100	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	100 TPA	03 June 2020
101	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	101 TPA	03 June 2020

102	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal	102 TPA	03 June 2020
103	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	103 TPA	03 June 2020
104	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	104 TPA	03 June 2020
105	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	105 TPA	03 June 2020
106	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautandan Perikanan	106 TPA	23 June 2020
107	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	107 TPA	23 June 2020
108	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	108 TPA	23 June 2020
109	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	109 TPA	06 July 2020
110	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	110 TPA	06 July 2020
111	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut	111 TPA	06 July 2020
112	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	112 TPA	06 July 2020
113	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	113 TPA	06 July 2020

114	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	114 TPA	06 July 2020
115	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	115 TPA	16 July 2020
116	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	116 TPA	17 July 2020
117	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	117 TPA	17 July 2020
118	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	118 TPA	17 July 2020
119	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangnan Manusia dan Kebudayaan	119 TPA	17 July 2020
120	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	120 TPA	17 July 2020
121	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	121 TPA	17 July 2020
122	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	122 TPA	21 July 2020
123	Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden	123 TPA	21 July 2020
124	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan	124 TPA	29 July 2020
125	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal	125 TPA	29 July 2020
126	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	126 TPA	30 July 2020

127	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	127 TPA	30 July 2020
128	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Perpustakaan Nasional	128 TPA	30 July 2020
129	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	129 TPA	30 July 2020
130	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	130 TPA	30 July 2020
131	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	131 TPA	30 July 2020
132	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian	132 TPA	30 July 2020
133	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	133 TPA	30 July 2020
134	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia	134 TPA	30 July 2020
135	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengettahuan Indonesia	135 TPA	30 July 2020
136	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keluattan dan Perikanan	136 TPA	30 July 2020
137	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	137 TPA	30 July 2020
138	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	138 TPA	30 July 2020
139	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	139 TPA	30 July 2020

140	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	140 TPA	30 July 2020
141	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung	141 TPA	30 July 2020
142	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	142 TPA	30 July 2020
143	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama	143 TPA	03 August 2020
144	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan	144 TPA	03 August 2020
145	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	145 TPA	05 August 2020
146	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan	146 TPA	05 August 2020
147	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	147 TPA	18 August 2020
148	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Badan Informasi Geospasial	148 TPA	18 August 2020
149	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	149 TPA	14 September 2020
150	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	150 TPA	14 September 2020
151	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	151 TPA	14 September 2020
152	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	152 TPA	16 September 2020

153	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan	153 TPA	16 September 2020
154	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	154 TPA	16 September 2020
155	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	155 TPA	22 September 2020
156	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	156 TPA	23 September 2020
157	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	157 TPA	23 September 2020
158	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	158 TPA	23 September 2020
159	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	159 TPA	23 September 2020
160	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	160 TPA	23 September 2020
161	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian	161 TPA	23 September 2020
162	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	162 TPA	23 September 2020
163	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	163 TPA	23 September 2020
164	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimppinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal	164 TPA	23 September 2020
165	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	165 TPA	23 September 2020

166	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan	166 TPA	23 September 2020
167	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung	167 TPA	23 September 2020
168	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	168 TPA	24 September 2020
169	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik	169 TPA	24 September 2020
170	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	170 TPA	24 September 2020
171	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	171 TPA	24 September 2020
172	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia	172 TPA	24 September 2020
173	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama	173 TPA	24 September 2020
174	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	174 TPA	23 Oktober 2020
175	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	175 TPA	26 Oktober 2020
176	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	176 TPA	26 Oktober 2020
177	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Standarisasi Nasional	177 TPA	26 Oktober 2020
178	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	178 TPA	26 Oktober 2020
179	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial	179 TPA	26 Oktober 2020

180	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	180 TPA	26 Oktober 2020
181	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	181 TPA	04 November 2020
182	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	182 TPA	06 November 2020
183	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	183 TPA	06 November 2020
184	Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Kepala Lembaga Administrasi Negara	184 TPA	06 November 2020
185	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	185 TPA	10 November 2020
186	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	186 TPA	25 November 2020
187	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	187 TPA	25 November 2020
188	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	188 TPA	8 Desember 2020
189	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan	189 TPA	8 Desember 2020
190	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	190 TPA	8 Desember 2020
191	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	191 TPA	8 Desember 2020
192	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	192 TPA	8 Desember 2020

193	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung	193 TPA	8 Desember 2020
194	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	194 TPA	8 Desember 2020
195	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	195 TPA	8 Desember 2020
196	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	196 TPA	8 Desember 2020
197	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	197 TPA	8 Desember 2020
198	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	198 TPA	8 Desember 2020
199	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	199 TPA	8 Desember 2020
200	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	200 TPA	8 Desember 2020
201	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	201 TPA	8 Desember 2020
202	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional	202 TPA	8 Desember 2020
203	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	203 TPA	22 Desember 2020
204	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	204 TPA	29 Desember 2020

205	Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	205 TPA	29 Desember 2020
206	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara	206 TPA	29 Desember 2020
207	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	207 TPA	29 Desember 2020
208	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi	208 TPA	29 Desember 2020

Lampiran 10:

Formulir *Checklist* Muatan Substansi LKj Biro SDM OT Tahun 2020

No	Jenis	Pernyataan		*Checklist*
1	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2	LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1	LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3	Penyusunan LKj Satuan Organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	√
		4	Data informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4	Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√

		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	√